

**DIPLOMASI COUNTER TERRORISM INDONESIA PADA  
MASA PEMERINTAHAN MEGAWATI SOEKARNO PUTRI  
DAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**SKRIPSI**



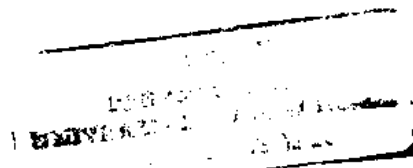
Disusun Oleh :

**NOERBANY MS**

NIM 070216736

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**SEMESTER GENAP 2006/2007**



**B**

**DIPLOMASI COUNTER TERRORISM INDONESIA PADA  
MASA PEMERINTAHAN MEGAWATI SOEKARNO PUTRI  
DAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi S1 pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga**



Disusun Oleh :

**NOERBANY MS**

NIM 070216736

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**SEMESTER GENAP 2006/2007**

**DIPLOMASI *COUNTER TERRORISM* INDONESIA PADA  
MASA PEMERINTAHAN MEGAWATI SOEKARNO PUTRI  
DAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**Pernyataan tidak melakukan plagiat**

Dengan ini saya menyatakan bahwa bagian atau keseluruhan isi skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun kecuali apabila dituliskan dengan format kutipan dalam isi skripsi.

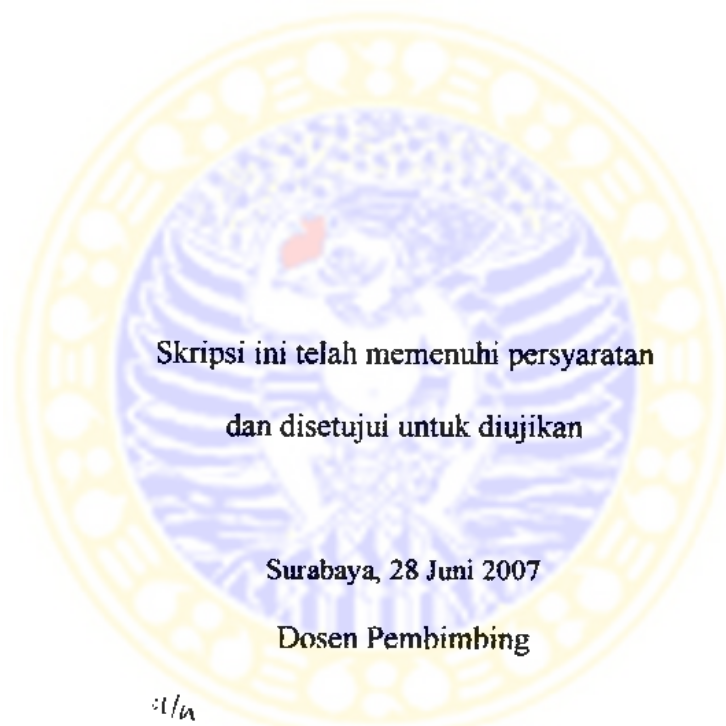
Surabaya, 28 Juni 2007

Penyusun

**NOERBANY MS**  
**NIM 070216736**

**DIPLOMASI *COUNTER TERRORISM* INDONESIA PADA  
MASA PEMERINTAHAN MEGAWATI SOEKARNO PUTRI  
DAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**LEMBAR PERSETUJUAN**



Skripsi ini telah memenuhi persyaratan  
dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 28 Juni 2007

Dosen Pembimbing

:/u

A handwritten signature in black ink, which appears to read "I Gede Wahyu Wicaksana". The signature is written in a cursive style and is positioned below the printed name.

**I Gede Wahyu Wicaksana, SIP, MA**

**NIP. NIP. 139 050 635**

## LEMBAR PENGESAHAN

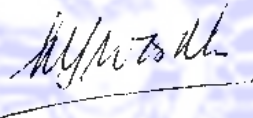
Skripsi berjudul

### **DIPLOMASI *COUNTER TERRORISM* INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN MEGAWATI SOEKARNO PUTRI DAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Telah dipertabankan di depan komisi penguji  
Pada hari Jum'at, 28 Juni 2007 pukul 13:00 – 15:00 WIB

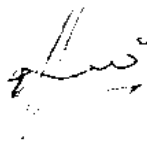
Komisi Penguji

Ketua,



**Dra. BLS Wahyu Wardhani, MA, Ph.D**  
NIP. 131.801.409

Anggota



**Dra. Lilik Salamah, M.Si**  
NIP. 131.569.360

Anggota



**M. Muttacien, S.IP, MA**  
NIP. 132.230.968

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Kupersembahkan tulisan ini untuk ayah bunda dan seluruh keluarga besarku tercinta yang selalu memberikan dukungan*

*se penuh hati*

*Juga bagi orang-orang yang telah menjadi korban aksi-aksi*

*terorisme*

## HALAMAN MOTTO



*Optimisme adalah 75 % dari awal kesuksesan, namun  
pesimisme adalah awal dari sebuah kegagalan total*

## KATA PENGANTAR

Menulis merupakan penuangan ide, sehingga para pembaca dapat mengerti apa yang hendak disampaikan oleh penulis. Penuangan ide tersebut didasari oleh konsep-konsep yang mendukung dari permasalahan sehingga segala sesuatu yang hendak dijabarkan memiliki alur yang jelas.

Penulisan skripsi merupakan salah satu diantaranya. Dari sinilah mahasiswa berusaha untuk belajar merangkai ide dan melatih diri untuk berfikir secara sistematis dengan dasar pemikiran yang jelas. Penulisan skripsi juga merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

Terrorisme merupakan sebuah fenomena yang sangat marak terjadi pada beberapa tahun belakangan di Indonesia. Dampak yang diakibatkan pun sangat besar. Dari segi ekonomi, Indonesia mengalami banyak kehancuran akibat banyaknya investor asing yang tidak bersedia menanamkan modalnya kembali karena faktor keamanan. Selain itu, merosotnya jumlah wisatawan asing juga mengalami penurunan yang berakibat pada penurunan jumlah devisa negara.

Dari segi pencitraan, Indonesia menjadi negara yang mendapat sorotan dunia internasional karena terindikasi sebagai sarang teroris. Hal ini tidak dapat disangkal jika melihat fakta akan banyaknya tindak terorisme yang terjadi dalam bentuk pengeboman semisal Bom Bali I.

Oleh karena itu, terorisme oleh pemerintah Indonesia dianggap sebagai sebuah tindakan yang tidak dapat ditoleransi sebab tindakan ini bukan hanya



membahayakan eksistensi negara, namun juga merupakan sebuah tindakan yang melanggar HAM. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memerangi terorisme.

Namun yang menjadi titik konsentrasi dari penulis dalam penelitian ini adalah langkah-langkah diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri (2002-2004) dan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2007) selaku presiden Indonesia dalam memerangi terorisme, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penelitian ini. Oleh karenanya, penulis sangat mengharapkan saran-saran serta perbaikan untuk menghasilkan pembahasan yang lebih baik lagi. Penulis juga berharap bahwa laporan penelitian ini dapat berguna, baik dari segi pengembangan keilmuan maupun bagi masyarakat luas. Namun, segala kekurangan yang terdapat dalam laporan penelitian ini adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari *khilaf* dan dosa dan jika ada manfaat dan *faedahnya* maka semua itu berasal dari Allah SWT.

Diakhir, segala puji syukur dihaturkan atas kehadiran ALLAH SWT . Atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu. Ucapan terima kasih pertama dihaturkan pada Ayahanda tercinta; Drs. Abd. Kadir (alm.), dan Ibunda tercinta; Ita Murniati. Tanpa mereka penulis tidak akan pernah ada di dunia ini. Terima kasih atas didikan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Kedua, adik-adik tercinta; Noerbarany Dwiyanita F. Dan Nabela Alfina A. yang selalu menjadi motivasi untuk melakukan yang terbaik dan terima kasih

karena telah menjadikan penulis teladan. Keluarga besar di Madura yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu. Keluarga Dr. Dwikora yang selalu memberikan bantuan moral dan materi. Buat kekasih hatiku, Kurnia Rismaningar di Fakultas Kedokteran Hewan yang selalu memberi motivasi.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada I Gde Wahyu Wicaksana (Mas Wahyu) selaku dosen pembimbing skripsi yang tidak pernah lelah selalu memberi *support*, kesabaran dan motivasi juga tidak segan mengkritik hasil laporan penelitian ini agar menjadi lebih baik, bila tidak dapat dikatakan sempurna. Juga atas semua pinjaman buku yang bermanfaat dalam menyelesaikan penelitian ini. Tidak lupa juga kepada semua dosen Hubungan Internasional yang sudah sangat berjasa; Bapak I. Basis Susilo; Bapak Djoko Sulistyono selaku dosen wali dan juga terima kasih atas motivasinya selama ini; Ibu Lilik Salamah yang telah memberikan motivasi dan pencerahan untuk terjun menjadi seorang pengajar; Mas Yunus yang telah memberikan sebuah pencerahan tidak langsung tentang bagaimana membuat sebuah tulisan dan berpikir ilmiah; Bapak Ajar Triharso; Bapak Vincensio Dugis yang telah memberikan sebuah bahan bagi salah satu bab dalam penelitian ini; Ibu Irma; Ibu Ani; Ibu Suhartatie Hidayat yang selama ini memperlakukan saya seperti anak sendiri dan atas bimbingannya pada semester pertama penelitian ini dibuat walaupun akhirnya gagal; Mas Joko Susanto atas solusi cerdasnya memahami sebuah tulisan atau pun buku.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Airlangga. Angkatan 2002: Widi, Haris, Akbar, Pipit, Wina, Billy, Rina, Ical, Nita, Icha, Lia, Fian, Gembul, Ivone, Dewi,

dan semuanya; angkatan 2003: Gari, Yustine, Yulia, Reza Komting, Zahra, Zaki, Gibi, Bontang, Lazu, Ari Kriting, Jembon, dll; angkatan 2004: Brian, Osenk, Pitut, Rizky Komting, Razak, Rio, Nadya TSM, Nadia Zahara, Indi, Rika, Gono dll; angkatan 2005: Vebry, Nisya, Rina, Fanny, Raindra, Chimi, dll; angkatan 2006: Andin, Ichan, Andi, Dodo, Renala, Nyek, Redo, Sasha, Tasya, Shinta, Bustomi, Zaki, dll; angkatan 2007: Dinda, Amy dll.

Teman-teman dari universitas, fakultas, program studi, dan instansi lain; Indra Ekonomi 2000, Niken Ekonomi 2005, Endri Psikologi 2002, Yayah Psikologi 2003, Ucik Kimia 2003, Fida FKM 2004, Ayu Komunikasi UPN 2004, Gangga FKH 2002, Bayu FKH 2003, Arif Antropologi 2000, Vika Komunikasi 2003, Danang Sejarah 2002, Riki Sejarah 2002, Mutiara Komunikasi UPN 2007, Marsya Dikjas Unesa 2007, Cicik Kapal Api, Firman, Dedi, Johan, Maman, Achie dan Linda (Satya Widya), Icha Smada, Ajenk Tehnik Lingkungan ITS 2007, Tya FKU 2004, Aya Trimurti, Dian Tari dan Dian Ayu (SMA 13), Cindy UPN, Dian Psikologi 2003, Dita di Salatiga, Mas Eko Iglo Net, Dina Sastra Inggris 2007, Hilda Politi 2006, Lala Politik 2002, Mirsa Antropologi 2002, Nina Psikologi Untag 2004, Nisa Cimutz Smala, Pungky Asuransi, Puspa Psikologi 2006, Safril HI 2001, Sindi Farmasi UI 2007, Fitri AN 2003, Lita AN 2003, Vinna SMU Barunawati, Wella di DJ FM.

Juga buat teman-teman nongkrong di pos modern: Gomal, Bedu, Yudha, Angga Cabul, Komeng, Ipank, Gogon, Rosyid, Dina, Feby, Jay, Hery, TeteH, Hadi Bogor, Chandra, Budi, Tika, dll.

Teman-teman organisasi: Ahong, Syauki, Adam, dll di Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia; Andi Mesum, Yudista, Emont, Nona, dll di Indie Party; Ninoy, Bustan, Darda, Chur, Aris, dll di forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep; Mbak Leny, Mbak Dwi, Mbak Imey, Mufti, Bapak Karyanto, Mbak Citra, Mami Lely, dll di Kids Line 199 Polwiltabes Surabaya; Mbak Cicik, Mas Anam, Mbak Ifah, Pak Pri di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.

Akhir kata, banyak pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu di sini, yang secara langsung dan tidak langsung sudah membantu penelitian ini., serta maaf apabila ada pihak-pihak yang lupa dicantumkan di sini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan melimpahkan rahmat-Nya untuk kalian semua, amin....

Surabaya, 8 Juni 2007

Noerbany MS

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <i>Halaman Judul Luar</i> .....  | i    |
| <i>Halaman Judul Dalam</i> .....   | ii   |
| <i>Halaman Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat</i> .....  | iii  |
| <i>Halaman Persetujuan</i> .....   | iv   |
| <i>Halaman Pengesahan</i> .....  | v    |
| <i>Halaman Persembahan</i> .....   | vi   |
| <i>Halaman Motto</i> .....   | vii  |
| <i>Kata Pengantar</i> .....  | viii |
| <i>Daftar Isi</i> .....  | xiii |
| <i>Abstrak</i> .....   | xv   |
| <br>   |      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | 1    |
| I.1 Latar Belakang Masalah .....   | 1    |
| I.2 Rumusan Masalah .....  | 4    |
| I.3 Tujuan Penelitian .....  | 4    |
| I.4 Kerangka Konseptual .....  | 5    |
| I.4.1 Konsep Diplomasi .....   | 5    |
| I.4.2 Konsep <i>Counter Terrorism</i> .....  | 13   |
| I.4.3 Konsep <i>Regional Security</i> .....  | 14   |
| I.5 Ruang Lingkup Penelitian .....   | 19   |
| I.6 Tipe Penelitian .....  | 19   |
| I.7 Teknik Pengumpulan Data .....  | 20   |
| I.8 Teknik Analisis Data .....   | 20   |
| I.9 Sistematika Penulisan .....  | 20   |
| <br>   |      |
| <b>BAB II DIPLOMASI COUNTER TERRORISM INDONESIA<br/>PADA MASA PEMERINTAHAN MEGAWATI<br/>SOEKARNO PUTRI</b> ..... | 23   |

|  |    |
|--|----|
| II.1 Bom Bali dan <i>Travel Warning</i> .....  | 23 |
| II.2 Kerja Sama Bilateral .....  | 26 |
| II.2.1 Amerika Serikat .....   | 27 |
| II.2.2 Australia .....   | 31 |
| II.2.2.1 Arti Penting Australia Bagi Indonesia .....   | 32 |
| II.2.2.2 <i>Trans-National Crime Centre (TNCC)</i> .....   | 34 |
| II.2.2.3 <i>Jakarta Centre of Law Enforcement Cooperation (JCLEC)</i> .....                                      | 35 |
| II.2.3 Kanada .....  | 37 |
| II.2.3.1 Sejarah Singkat .....   | 37 |
| II.2.3.2 Kerja Sama Indonesia-Kanada .....   | 38 |
| II.3 Kerja Sama Multilateral .....   | 44 |
| II.3.1 <i>ASEAN Security Community (ASC)</i> .....   | 44 |
| <br>   |    |
| <b>BAB III DIPLOMASI COUNTER TERRORISM INDONESIA</b>   |    |
| <b>PADA MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG</b>   |    |
| <b>YUDHOYONO</b> .....   | 49 |
| III.1 Upaya Normalisasi Kerja Sama Militer Amerika Serikat-Indonesia<br>dan Kerja Sama Indonesia-Australia ..... | 49 |
| III.2 Kerja Sama Bilateral .....   | 50 |
| III.2.1 Amerika Serikat .....  | 50 |
| III.2.2 Australia .....  | 54 |
| III.3 Kerja Sama Multilateral .....  | 57 |
| III.3.1 <i>ASEAN Security Community (ASC)</i> .....  | 58 |
| <br>   |    |
| <b>BAB IV KESIMPULAN</b> .....   | 63 |
| <br>   |    |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | 73 |

## ABSTRAK

Serangkaian serangan bom yang terjadi di Indonesia yang pertama kali terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 di Jimbaran Bali telah memberikan dampak kerugian yang begitu besar bagi Indonesia. Peristiwa yang tidak terjadi hanya sekali tersebut membuat pemerintah Indonesia di masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan berbagai upaya diplomasi untuk memerangi terorisme (*counter terrorism*).

Penelitian ini mendeskripsikan upaya diplomasi *counter terrorism* yang dilakukan Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono, baik bilateral maupun multilateral. Permasalahan dalam penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif ini adalah Langkah-langkah diplomasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam memerangi terorisme (*counter terrorism*). Permasalahn itu kemudian dideskripsikan dengan menggunakan kerangka konseptual konsep diplomasi, konsep keamanan regional dan konsep *counter terrorism*.

Hasil penelitian yang diperkuat data dan fakta akhirnya dapat mendeskripsikan langkah-langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam memerangi terorisme (*counter terrorism*) baik bilateral maupun multilateral.

*Kata kunci:* Indonesia, pemerintahan Megawati Soekarno Putri, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, diplomasi dan *counter terrorism*.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Tahun 2002 menjadi awal sebuah rangkaian serangan teror di Indonesia. Dimulai oleh Tragedi Bom Bali pada 12 Oktober 2002. sebuah bom dengan bobot 5 kilogram meledak di Jalan Legian, tepatnya di Paddy's Pub dan Sari Club. Tragedi yang lebih dikenal sebagai Tragedi Bom Bali I yang didalangi oleh Imam Samudra alias Abdul Aziz ini telah menewaskan kurang lebih 200 orang<sup>1</sup>. Bahkan dari sumber lain tercatat bahwa korban yang jatuh dalam peristiwa tersebut adalah 187 turis mancanegara tewas dan mencederai 300 orang lainnya<sup>2</sup>. Sebuah tragedi kemanusiaan yang hingga saat ini masih menyisakan trauma yang cukup dalam. Peristiwa itu juga mempunyai imbas yang sangat terasa di bidang pariwisata. Tercatat bahwa pada kisaran tahun 2002 ke 2003 terjadi penurunan yang cukup besar, yaitu 19% di bidang pariwisata.<sup>3</sup>

Belum sirna trauma masyarakat, Indonesia diguncang kembali oleh insiden peledakan bom. Kali ini Hotel JW Marriot yang menjadi sasaran aksi teror yang dilancarkan oleh para teroris yang pada akhirnya diketahui sebagai sebuah jaringan teroris internasional dengan Noordin M. Top sebagai otak dari kejadian tersebut. Insiden tersebut terjadi pada tanggal 5 Agustus 2003 dan telah

---

<sup>1</sup> Ali Imron Ungkap Kronologi Peledakan Bom Bali, *Kompas*, 5 Juni 2003.

<sup>2</sup> Adjie. S, *Terorisme*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005, hal. 417.

<sup>3</sup> Teror Bom dan Wisatawan AS, *Kompas*, 19 November 2005.





menewaskan belasan orang dan puluhan orang luka-luka<sup>4</sup>. Sebuah sumber menyatakan bahwa korban yang jatuh pada peristiwa ini adalah 12 orang tewas dan 149 lainnya cedera, termasuk 2 orang warga negara Amerika Serikat<sup>5</sup>. Pasca kejadian tersebut, teror bom seakan-akan tak pernah lepas dari kehidupan bangsa Indonesia. Setahun setelah peristiwa bom Hotel JW Marriot, tepatnya pada tanggal 9 Maret 2004, bom kembali meledak. Kali ini tidak tanggung-tanggung, kantor Kedutaan Besar Australia yang menjadi sasaran. Insiden yang terjadi di depan kantor Kedutaan Besar Australia di kawasan Kuningan, Jakarta tersebut menewaskan 6 orang, termasuk pelaku pemboman, dan mencederai 100 orang.

Akibat serangkaian peristiwa peledakan bom yang terjadi, dampak yang dirasakan oleh Indonesia sangat luar biasa. Di bidang ekonomi terjadi kemerosotan, terutama dalam sektor investasi disebabkan adanya ketidakpercayaan investor terhadap keamanan Indonesia. Pemerintah dianggap gagal dalam hal stabilitas keamanan. Di sektor pariwisata bahkan menunjukkan angka penurunan yang sangat signifikan. Pada kisaran 2002 sampai 2003 saja tercatat terjadi kemerosotan sebesar 19% di sektor ini. Hal ini tentu saja sangat merugikan mengingat sektor pariwisata adalah salah sektor utama penghasil devisa negara yang sangat mengandalkan Pulau Dewata, Bali sebagai maskot wisata mengingat Bali adalah *The Best Island in the World* versi majalah terkemuka Amerika Serikat, *Travel & Leisure* secara berturut-turut pada tahun 2004 dan 2005<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Abdul Wahid, at al, *Kejahatan Terorisme : Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2004, hal. 3.

<sup>5</sup> Adjie.S, *op.cit.*, hal. 437.

<sup>6</sup> Teror Bom dan Wisatawan AS, *loc.cit.*

Tidak hanya itu, bahkan Australia dan Amerika Serikat yang sedang gencar-gencarnya memerangi terorisme di dunia internasional mulai memberikan sebuah stigma yang buruk terhadap Indonesia. Kedua negara tersebut menilai bahwa Indonesia selalu disebut-sebut sebagai salah satu mata rantai yang signifikan dari jaringan kelompok teroris itu, bahkan mereka menuding Indonesia sebagai negara sarang teroris<sup>7</sup>. Citra Indonesia di mata dunia internasional pun turut tercoreng.

Oleh karena itu, Indonesia menganggap bahwa terorisme adalah persoalan yang pada saat ini menjadi sebuah persoalan yang sangat penting, bukan hanya pada tingkat domestik namun juga di tingkat regional dan internasional. Berbagai tindakan mulai dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk berperan serta dalam memerangi terorisme. Tindakan yang dilakukan bukan hanya bertujuan untuk menghapus stigma buruk yang melekat pada Indonesia pasca serangkaian insiden terror bom yang telah terjadi bahwa Indonesia bukan lagi sebuah negara yang aman untuk disinggahi bahkan merupakan negara sarang teroris, namun juga sebagai implikasi dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Diplomasi pun dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan kerja sama memerangi terorisme (*counter terrorism*). Kerja sama bilateral dan multilateral pun dilakukan. Salah satu negara yang bersedia melakukan kerja sama tentu saja adalah Amerika Serikat. Menurut Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Tom Ridge, ancaman terorisme dapat dicegah lewat kerja sama antarnegara dan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Indonesia adalah partner utama Pemerintah Amerika Serikat di antara seluruh negara di Asia<sup>8</sup>. Di tingkat regional pun, Indonesia tidak kalah agresif. Melalui ASEAN Indonesia menjalin kerja sama dalam memerangi terorisme (*counter terrorism*).<sup>9</sup>

## **I.2 Rumusan Masalah**

Latar belakang masalah di atas kemudian memunculkan permasalahan sebagai berikut:

Langkah-langkah diplomasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam memerangi terorisme (*counter terrorism*)?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara spesifik penelitian ini bertujuan mendeskripsikan langkah-langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam memerangi terorisme (*counter terrorism*), baik yang bersifat bilateral maupun multilateral.

---

<sup>8</sup> AS Minta Pemahaman RI Soal Terorisme, *Kompas*, 11 Maret 2004.

<sup>9</sup> Philips Jusario Vermonte, ASEAN Harus Tetap "Corner Stone", *Kompas*, 1 April 2004.

## **I.4 Kerangka Konseptual**

### **I.4.1 Konsep Diplomasi**

Menurut Sudijono, S.IP, MSi, mantan Komandan Lanal dan mantan Direktur AMNI Semarang, pengertian diplomasi adalah "manajemen" bagaimana negara berhubungan satu sama lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasionalnya.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut S.L. Roy, diplomasi diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional suatu negara.<sup>11</sup> Menurut S.L. Roy diplomasi mempunyai dua tujuan utama, yaitu tujuan politik dan tujuan ekonomi.<sup>12</sup> Tujuan politik dari diplomasi adalah pengamanan kebebasan politik dan integritas teritorialnya. Hal tersebut bisa dicapai dengan memperkuat hubungan dengan negara sahabat, memelihara hubungan erat dengan negara yang sehaluan dan menetralkan negara yang memusuhi.

Fungsi tujuan politik adalah untuk menunjukkan suatu itikad baik dan menghilangkan keragu-raguan negara-negara lain sehubungan dengan persekutuan politik dan juga untuk menghasilkan sebuah saling pengertian dengan suatu negara.

Sedangkan tujuan ekonomi dari diplomasi adalah berusaha mencari tempat berpijak di pasar-pasar baru dan pada saat yang sama berusaha keras mengamankan kepentingan ekonomi mereka di daerah dimana mereka telah mampu mempertahankan kehadiran mereka dengan menghilangkan kompetisi.

<sup>10</sup> Sudijono, Sengketa dengan Negara Lain, *Suara Merdeka*, 28 April 2005.

<sup>11</sup> S.L. Roy, *Diplomasi*, terj. Harwanto dan Mirsati, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 5.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 6-12.

Fungsi tujuan ekonomi adalah untuk memapankan suatu pola perdagangan yang cocok bagi perekonomian suatu negara. Negosiasi diplomatik dilakukan untuk meningkatkan kepentingan dagang dan ekonomi. Diplomasi ini juga bisa dilakukan untuk menaikkan posisi tawar (*bargaining power*) karena dunia saat ini terbagi pada dua kamp ideologi yang saling bertentangan. Kedua belah pihak tersebut berusaha menarik negara-negara lain ke pihak mereka dengan menawarkan kerja sama yang menarik.

Diplomasi dilakukan untuk meng-*goal*-kan kepentingan nasional. Hal ini disebabkan karena setiap negara mempunyai kepentingan nasional yang berbeda dan berupaya untuk meng-*goal*-kan kepentingan nasional mereka dan politik internasional adalah arena untuk saling memperjuangkan kepentingan nasional. Konsep kepentingan nasional menjelaskan aspek-aspek yang diperjuangkan oleh negara dalam hubungan internasional. Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar serta faktor penting dan menentukan dalam politik luar negeri suatu negara.<sup>13</sup> Politik luar negeri ditujukan untuk pencapaian kepentingan nasional. Spesifikasi tujuan nasional dalam politik luar negeri, disamping penyesuaian kebutuhan nasional adalah sangat penting. Sebenarnya konsep kepentingan nasional digunakan untuk mengupas tujuan nasional suatu negara.

Ada beberapa kepentingan nasional berdasarkan urgensinya baik dari yang vital hingga *ordinar*. Morgenthau memilah-milah kepentingan nasional menjadi<sup>14</sup>:

<sup>13</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, terj. Edi S. Siregar, CV Abardin, Bandung, 1990, hal.7.

<sup>14</sup> Thomas W. Robinson, "National Interest", dalam James N. Rosenau (Ed.), *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, The Free Press, New York, 1969, hal.18.

1. *Primary Interest*, yang termasuk didalamnya adalah perlindungan terhadap identitas, kebudayaan, politik dan kondisi bangsa untuk kelangsungan hidup melawan berbagai ancaman dari luar.
2. *Secondary Interest*, seperti melindungi warga negara di luar negeri, serta melindungi para diplomat.
3. *Permanent Interest*, kepentingan yang relatif konstan dalam waktu yang lama, hal ini berubah namun sangat lambat.
4. *Variable Interest*, merupakan fungsi dari berbagai kepentingan, serta opini publik, kelompok penekan, partisan politik serta kebiasaan moral dan politik.
5. *General Interest*, kepentingan yang diterapkan secara luas melalui batas-batas negara.
6. *Specific Interest*, kepentingan yang sangat khusus dalam waktu tertentu dan sering sebagai pertumbuhan dari *General Interest*.

Selanjutnya Morgenthau menyatakan bahwa arti yang inheren dalam kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup. Negara harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya, mempertahankan rezim ekonomi dan politik. Dari tujuan umum ini para pemimpin dapat merumuskan menjadi

serangkaian kebijakan yang bersifat spesifik, baik bersifat kerjasama maupun konflik.<sup>15</sup>

Dipandang dari konsep kepentingan nasional, maka kebijakan *counter terrorism* pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono merupakan kebijakan yang tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk mencapai kepentingan nasionalnya, yang mana kebijakan tersebut dapat digolongkan ke dalam *General Interest* (kepentingan umum) yakni meliputi kepentingan-kepentingan yang luas dalam rangka mendukung dan memenuhi kebutuhan nasionalnya, terutama selama masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Untuk mencapai kepentingan nasional, suatu negara melakukan upaya diplomasi sebagai implementasi kebijakan luar negeri. Dalam rangka pemenuhan kepentingan nasional yang maksimal, suatu negara tentunya akan melaksanakan kebijakan luar negerinya secara maksimal pula. Menurut K.J. Holsti, Kebijakan Luar Negeri dapat diartikan sebagai tindakan atau ide yang dirancang oleh pembuat keputusan untuk memecahkan suatu masalah atau mengadakan perubahan dalam lingkungan eksternal melalui berbagai kebijakan, sikap atau tindakan.<sup>16</sup> Dalam pandangan Holsti, ada 4 komponen dalam kebijakan luar negeri yang mendasari suatu negara melakukan interaksi dalam sistem internasional,

---

<sup>15</sup> Mochtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*, Pusat Antar Universitas-Studi Sosila UGM, Yogyakarta, 1989, hal.164.

<sup>16</sup> K.J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Analisa*, Elfin Sudrajat (terj.), et al., Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1987, hal.135.

yaitu orientasi kebijakan luar negeri, peran nasional, tujuan nasional dan tindakan nasional.<sup>17</sup>

Pertama, orientasi kebijakan luar negeri menurut Holsti merupakan sikap dan komitmen umum suatu negara terhadap lingkungan eksternal dan strategi fundamentalnya untuk mencapai tujuan dalam dan luar negerinya. Strategi atau orientasi umum suatu negara jarang diungkapkan dalam suatu keputusan, namun merupakan hasil dari serangkaian tujuan, nilai dan kepentingan dengan kondisi dan karakteristik lingkungan domestik dan eksternal. Ada 4 variabel dalam menentukan pilihan dari orientasi kebijakan luar negeri, yaitu : struktur internasional, yang mana struktur itu dapat berubah-ubah dan akan mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara; kebijakan luar negeri yang dikaitkan dengan sifat dan sikap domestik dari kebutuhan sosial dan ekonomi domestik negara tersebut; tingkat persepsi pembuat keputusan terhadap ancaman dari nilai-nilai dan kepentingan yang berkaitan dengan orientasi mereka terhadap lingkungan eksternal; letak geografis, karakteristik topografi dan sumber daya alam.

Dengan mengkaji struktur kekuasaan dan pengaruh serta tindakan unit politik dalam berbagai sistem internasional, dapat diidentifikasi ada 3 orientasi fundamental, yaitu; isolasi, yang mana orientasi ini ditunjukkan dari tingkat keterlibatan yang rendah dalam sebagian besar isu sistem, jumlah transaksi diplomatik dan komersial yang rendah dengan unit politik atau masyarakat lain dalam upaya menutup rapat negeri terhadap berbagai bentuk penetrasi eksternal. Orientasi ini didasarkan pada asumsi bahwa negara dapat

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 137.



mencapai keamanan dan kemerdekaan dengan mengurangi transaksi dengan unit politik lain dalam sistem, atau dengan memelihara hubungan diplomatik dan perdagangan luar negeri, sambil memagari semua ancaman yang dirasakan atau ancaman potensial dengan membentuk tembok administrasi di sekitar basis dalam negeri.

Orientasi kedua adalah non-blok. Orientasi ini timbul karena adanya keengganan melibatkan kemampuan militer terhadap tujuan-tujuan negara lain. Orientasi ini menunjukkan bahwa suatu negara tidak melibatkan kemampuan militer dan kadang-kadang dukungannya diplomatiknya terhadap tujuan negara lain.

Orientasi berikutnya adalah pembentukan koalisi dan aliansi. Orientasi koalisi diplomatik dan aliansi militer timbul karena asumsi bahwa mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka, mempertahankan kepentingan mereka, atau menghalangi ancaman yang dirasakan dengan memobilisasi kemampuan mereka sendiri. Jadi, mereka mengandalakan dan membuat komitmen dengan negara lain yang juga menghadapi masalah luar negeri yang sama, atau secara bersama mereka mencapai tujuan tersebut.

Kedua, peran nasional. Menurut Holsti merupakan *output* kebijakan luar negeri yang hanya dikaitkan dengan negara yang terlibat dalam masalah sistem dan regional. Dengan kata lain, negara yang memiliki keterlibatan yang tinggi di dunia internasional menganggap dirinya menjalankan berbagai peran internasional. Tindakan kebijakan luar negeri suatu negara tentu akan konsisten dengan konsepsi peran luar negerinya.

Ketiga, tujuan nasional. Tujuan nasional dibagi menjadi tiga, yaitu; tujuan jangka pendek, dimana nilai dari kepenyingan inti yang melibatkan setiap eksistensi pemerintahan dan bangsa harus dilindungi dan diperluas sepanjang waktu; tujuan jangka menengah yang biasanya memaksakan tuntutan pada negara lain dengan menggunakan berbagai pembatasan. Tujuan ini berupa perencanaan, impian dan pandangan tentang organisasi dari sistem tersebut dan peran negara tertentu di dalamnya. Pada hakekatnya, setiap negara mempunyai tujuan yang sebagian besar hanya dapat diraih dengan berhubungan dan menyebarkan pengaruhnya terhadap negara lain.

Keempat, tindakan nasional sebagai hasil yang dilakukan pemerintah terhadap pihak lain untuk menghasilkan orientasi, memenuhi peran atau mencapai dan mempertahankan tujuan tertentu. Tindakan nasional dimaksudkan untuk mengubah atau mendukung pemerintah lain. Tindakan nasional sangat berperan bagi keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan nasional.

Para pembuat keputusan luar negeri adalah rasional, yaitu bahwa pemilihan suatu strategi benar-benar didasarkan pada pertimbangan bagi pencapaian hasil yang maksimal dari suatu tujuan yang jelas. Menurut Prof. Bintoro Tjokroaminoto, strategi adalah serangkaian kebijakan dan pelaksanaan (*policy, decision, dan execution*) di dalam rangka pencapaian tujuan dan dalam memecahkan persoalan tertentu.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Prof. Bintoro Tjokroaminoto, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta, PT. Gunung Agung, 1984, hal. 15.

Sedangkan menurut Charles A. May, Jr., strategi memiliki makna yang luas, tidak hanya kekuatan militer tapi juga sumber-sumber politik, ekonomi dan psikologis.<sup>19</sup>

John P. Lovell mengemukakan bahwa dasar pemikiran dalam perspektif strategi bagi kebijakan didasarkan pada penilaian variabel-variabel kunci dalam pembentukan strategi tersebut yang meliputi: pihak-pihak dan persekutuan, penting atau tidaknya permasalahan, penilaian strategi pihak-pihak lain, aturan permainan dan pengestimasian kapabilitas.<sup>20</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah rangkaian kebijakan dan pelaksanaan (policy, decision, dan execution) yang didukung oleh sumber daya ekonomi, psikologis, politik dan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam rangka pencapaian tujuan dan dalam memecahkan persoalan tertentu.

Umumnya perancangan strategi politik luar negeri tidak didasarkan pada pertimbangan moral, keyakinan, atau hal-hal yang bersifat emosional. Perancangan strategi adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan dan bukan tindakan untung-untungan.<sup>21</sup>

Asumsi dasar dalam Teori Strategis menurut Patrick Morgan adalah:<sup>22</sup>

- a. Perilaku politik luar negeri suatu negara-bangsa pasti diarahkan untuk mencapai satu atau beberapa tujuan internasional. Setiap tindakan yang diambil pasti

<sup>19</sup> Charles A. May, Jr., "Introduction To Strategi", dalam Richard G. Head and Ervin J. Rokke (eds.), *American Defense Policy*, 3<sup>rd</sup> ed., Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1973, hal. 40.

<sup>20</sup> John P. Lovell, *Foreign Policy in Perspective*, New York, HR and Winston, 1970, hal 69-74.

<sup>21</sup> K.J. Holsti, *op.cit.*, hal 90

<sup>22</sup> Pendapat Patrick Morgan seperti dikutip dalam Mochtar Mas' oed., *ibid*

dimaksudkan sebagai suatu langkah ke arah pencapaian tujuan tersebut.

- b. Para pembuat keputusan selalu berusaha memaksimalkan perolehan bagi negaranya. Hal ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai alternatif tindakan, yang masing-masing dinilai berdasarkan analisis biaya-hasil (*cost-benefit*). Alternatif tindakan yang diambil adalah memenuhi kriteria efisiensi.
- c. Dalam dunia yang saling bergantung, berarti bahwa para pembuat keputusan harus mempertimbangkan juga tujuan dan atrategi negara-bangsa lain.

Kebijakan counter terrorism yang dibuat oleh pemerintah Indonesia pada pemerintah Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono merupakan hasil dari perhitungan yang sudah dipikirkan untung-ruginya yang diarahkan untuk pencapaian maksimal tujuan nasional negara. Dengan kata lain, bahwa tindakan tersebut diambil dengan menyesuaikan antara tujuan nasional Indonesia, kemampuan mencapai tujuan tersebut dan situasi yang dihadapi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono.

#### **1.4.2 Konsep *Counter Terrorism***

Menurut Buku Putih Departemen Pertahanan Republik Indonesia, kebijakan *counter terrorism* adalah kebijakan yang dibuat dalam rangka

memerangi terorisme yang secara konkrit penanganan ancaman terorisme dapat bersifat mendahului (*pre-emptif*), mencegah (*preventif*), dan menekan (*refresif*). Upaya *preemptif* dilaksanakan melalui suatu kegiatan infiltrasi atau operasi untuk menghancurkan basis-basis teroris yang berada di wilayah NKRI, termasuk kegiatan untuk mengungkap jaringan teroris secara tuntas.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Buletin Balitbang Dephan, kebijakan *counter terrorism* adalah strategi pemberantasan terorisme diimplementasikan melalui upaya represif, preventif, *preemptif*, resosialisasi dan rehabilitasi serta pengembangan infrastruktur pendukung.<sup>24</sup>

Upaya preventif dimaksudkan untuk mencegah wilayah dan segenap bangsa Indonesia, termasuk warga negara lain yang berada di Indonesia dari korban keganasan teroris. Untuk mewujudkan maksud tersebut, maka langkah-langkah kewaspadaan melalui deteksi dan hubungan satuan maupun individu akan terus dikembangkan. Dalam rangka preventif, kegiatan pengamanan VIP (*Very Important Person/s*), obyek dan instalasi vital, sarana dan prasarana publik, sarana dan prasarana internasional, fasilitas negara dan fasilitas penting lainnya akan ditingkatkan. Kegiatan yang bersifat menunjang kegiatan deteksi dan cegah dini seperti *surveillance*, identifikasi, dan dukungan teknis lainnya akan dilengkapi secara bertahap dan berlanjut.

Upaya represif dilaksanakan melalui kegiatan *counter terrorist* dalam bentuk operasi militer untuk menumpas jaringan teroris di seluruh wilayah NKRI. Operasi militer dimaksud antara lain meliputi serangan komando ke markas atau

<sup>23</sup> Buku Putih Dephan, dalam \_\_\_\_\_, diakses tanggal 27 Maret 2007.

<sup>24</sup> *Ibid.*

basis-basis teroris untuk melumpuhkan para teroris, serta pembebasan sandera, dan kegiatan operasi lain untuk menumpas teroris secara tuntas. Pelaksanaannya melalui koordinasi lintas instansi dan bila diperlukan secara lintas negara.

Upaya rehabilitasi diperlukan guna mengembalikan kondisi suatu tempat atau daerah yang terkena dampak kegiatan terorisme, Pelaksanaan rehabilitasi dilaksanakan melalui koordinasi lintas instansi sesuai fungsi masing-masing. Untuk menjamin terlaksananya tindakan terhadap suatu kegiatan teror yang memerlukan penanganan segera, maka peningkatan kemampuan satuan-satuan khusus yang dipersiapkan dan sewaktu-waktu digerakkan adalah penting.

#### **1.4.3 Konsep *Regional Security***

Menurut Barry Buzan, ide keamanan regional (*regional security*) pada dasarnya berisi tentang subsistem hubungan keamanan yang terdapat diantara beberapa negara yang memiliki kedekatan secara geografis.<sup>25</sup> Selama ini, analisis keamanan hanya berpusat pada dua kutub saja, yaitu sistem keamanan internasional di satu sisi dan keamanan nasional di sisi lain. Analisis yang terjadi kebanyakan hanya memfokuskan pada satu sisi, sistem internasional atau keamanan nasional saja. Analisis keamanan regional kemudian berfungsi untuk menjembatani antara kedua kutub tersebut, sehingga sebuah sistem keamanan dapat dipahami secara komprehensif, yaitu sebagai sistem keamanan yang didalamnya terdapat hubungan antara sistem keamanan internasional (yang berfokus pada

---

<sup>25</sup> Barry Buzan & Gowher Rivzi, *South Asian Insecurity and The Great Powers*, London, The Macmillan Press Ltd., 1986, hal. 1-9.

relasi antara *great powers* dengan *local states*) dengan sistem keamanan regional (yang memfokuskan pada relasi antar *local states*).

Menurut Buzan, keamanan adalah hal yang relasional. Ia tidak hanya melibatkan kemampuan, keinginan dan kekhawatiran negara secara individual, namun juga kemampuan, keinginan dan kekhawatiran dari negara lain yang berhubungan dengannya. Karena sifatnya yang relasional itulah kita tidak bisa memahami keamanan nasional dari suatu negara tanpa mengerti pola keamanan internasional yang bersifat interdependen yang terkait dengannya. Oleh karena itu diperlukan suatu kerangka kerja yang dapat dipakai untuk memahami analisis keamanan regional ini.

Kerangka kerja dimulai dengan penelitian atas semua tingkatan mulai dari tingkat *individual states* samapai tingkat *internasional system*, serta pola interaksi mereka. Ada dua tingkatan yang sudah teridentifikasi, yang pertama adalah negara yang merupakan unit dasar dari keamanan di sistenn internasional. Kita dapat menelaah problem keamanan di tingkat ini baik dalam kerangka stabilitas inheren dari *individual states* itu sendiri atau dalam kerangka kerentanannya terhadap ancaman yang datang dari luar. Sementara itu di tingkatan yang paling atas kita berhadapan dengan karakteristik dan struktur dari seluruh sistem internasional itu sendiri.

Hal berikutnya adalah menentukan tingkat menengah yang akan menjadi jembatan dari kedua kutub di atas. Ada dua parameter yang bisa dipakai untuk menentukan pola interaksi pada tingkatan subsistem ini, yaitu melalui variabel *power* atau *regional balances of power* dan variabel *amity-enmity* atau

permusuhan-persahabatan. Pada variabel pertama, berfokus pada distribusi dari *power* itu sendiri. Sayangnya ia memiliki kelemahan yaitu sangat rentannya ia terhadap perubahan, serta masuknya pengaruh asing yang lebih kuat dari tingkatan yang lebih tinggi. Sementara itu, variabel persahabatan-permusuhan mengandung asumsi bahwa terdapat sebuah tatanan negara-negara lokal yang persepsi keamanan utamanya saling berhubungan secara dekat sedemikian sehingga problema keamanan nasional mereka tidak dapat secara bisa realistis dipisahkan satu sama lain. Hal inilah yang oleh Buzan disebut dengan *security complex*.

*Security complex* adalah fenomena empiris yang memiliki akar historis dan geopolitis. Ia adalah produk asli dari sistem internasional yang anarkhis, dan mereka mewakili substruktur yang bertahan lama namun tidak permanen. Keotentikan dari *security complex* ini terletak pada perspektif mereka yang parsial (yaitu pola permusuhan-persahabatan antar negara) daripada perspektif yang holistik (ide tentang subsistem regional). Dengan ini, isu keamanan akan lebih mudah diidentifikasi karena hanya memiliki dua *output* saja, yaitu kebijakan luar negeri dan perilaku militer.

Konsep ini dapat menjelaskan keinginan Indonesia untuk membentuk *ASEAN Security Community (ASC)* dilihat dari aspek geografi dan sejarah yang berarti negara-bangsa cenderung untuk melakukan hubungan keamanannya dalam konteks regional daripada dalam konteks global. Kedekatan geografis dan kekeluargaan menjadi salah satu sumber ketakutan dari negara bangsa. Hal ini menjelaskan mengapa tingkat permusuhan-persahabatan dan hubungan kekuatan menjadi dua indikator dari *security complex*.



Keamanan regional bisa dicapai melalui kerjasama di tingkat regional. Kerja sama terjadi sebagai hasil penyesuaian perilaku aktor-aktor hubungan internasional dalam merespon, mengantisipasi, sebagai *preference* terhadap aktor-aktor lain dalam hubungan internasional. Kerja sama dapat dinegosiasikan dalam suatu proses *bargaining* baik itu secara eksplisit maupun diam-diam. Kerja sama bisa juga merupakan hasil dari hubungan antara aktor yang lebih kuat dengan aktor yang lemah.

Kerja sama didefinisikan sebagai suatu hubungan yang tidak didasarkan atas koersi dan pertikaian, serta dilegitimasi dalam organisasi internasional. Aktor negara menjalankan hubungan dalam suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didasari atas kesepakatan peraturan, regulasi, norma dan proses pengambilan keputusan, yang didalamnya negara berusaha memecahkan isu-isu yang dihadapi bersama.<sup>26</sup>

Teori kerja sama internasional menekankan apa keuntungan suatu aktor dalam melakukan suatu kerja sama. Teori kerja sama mendasarkan pada kepentingan nasional dalam suatu sistem internasional yang anarkhis. Fokus yang ditekankan adalah hubungan antara dua negara dan hubungan banyak negara yang dikenal dengan istilah multilateralisme.<sup>27</sup>

Dalam kerja sama regional melibatkan aktivitas negosiasi dan konstruksi kesepakatan interstate atau intergovernmental yang lebih dikenal lagi dengan nama rezim. Bentuk kerja sama regional tersebut bisa formal dan informal yang

---

<sup>26</sup> James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations, A Comprehensive Survey, 4<sup>th</sup> Edition*, New York, Longman Inc, 1997, hal. 418.

<sup>27</sup> *Ibid.*

diinstitutionalkan dalam suatu institusi yang lebih tinggi. Oran Young mengemukakan:

“Though all regimes, even highly decentralized private enterprise arrangement are social institution, they need not to be accompanied by organizations possessing their own personal, budgets, physical facilities and so forth”<sup>28</sup>.

Studi tentang kerja sama internasional difokuskan pada rezim kerja sama seperti norma, aturan dan proses pengambilan keputusan serta harapan suatu aktor dalam keikutsertaannya dalam suatu kerja sama internasional. Dalam konteks kerja sama regional dapat dilihat dalam pola pertemuan regular dan kesepakatan yang dihasilkan serta mekanisme kerja sama yang akan dilakukan.

Menurut Andrew Hurrell, kerja sama regional memiliki berbagai macam tujuan. Di satu pihak, sebagai alat untuk merespon tantangan eksternal dan mengkoordinasi posisi mereka dalam institusi internasional atau dalam forum negosiasi. Di lain pihak, sebagai sarana untuk meraih kesejahteraan bersama, mendorong *common value*, memecahkan problem bersama.<sup>29</sup>

Dalam konteks ini, ASEAN merupakan forum kerja sama regional yang digunakan oleh Indonesia dalam menjalin hubungan kerja sama dalam menghadapi permasalahan-permasalahan bersama yang dihadapi oleh negara-negara Asia Tenggara yaitu terorisme. Kerjasama tersebut bisa dilihat berdasar pertemuan regular dan kesepakatan yang telah dicapai guna menghadapi permasalahan terorisme.

<sup>28</sup> Oran Young, *International Cooperation: Building Regimes for Natural Resources and The Environment*, New York, Cornell Up, 19889, hal. 25.

<sup>29</sup> Andrew Hurrell, “Regionalism in Theoretical Perspective”, *Regionalism in World Politics*, eds. Andrew Hurrell, Louise Fawcett, London, Oxford University Press, 1995, hal. 42.

### **I.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian difokuskan pada langkah-langkah diplomasi dalam memerangi terorisme (*counter terrorism*) yang diambil oleh pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri (2002-2004) dan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2007), baik yang bersifat bilateral maupun multilateral.

### **I.6 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menjawab pertanyaan apa, kapan atau berapa dan dalam penelitian ini juga dilakukan usaha penggambaran pola dan karakteristik.<sup>30</sup>

Penelitian deskriptif bertujuan membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dan antara satu faktor dengan faktor lain.<sup>31</sup>

Penulis berusaha menggambarkan langkah-langkah diplomasi Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam memerangi terorisme (*counter terrorism*). Dan tipe penelitian ini tidak memerlukan hipotesis.

### **I.7 Tehnik Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan studi pustaka,<sup>32</sup> yang mana data-data dikumpulkan atau diperoleh dari buku-buku, surat kabar, majalah dan artikel dari internet yang memuat tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

<sup>30</sup> Masri Singarimbun & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, 1989, hal. 4-5.

<sup>31</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hal. 63-64.

<sup>32</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *op.cit.*, hal.68.

## **I.8 Tehnik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>33</sup> Dukungan data-data kuantitatif dipakai sebagai bukti keabsahan deskripsi penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mencari pemecahan masalah tidak dengan menggunakan data-data kuantitatif atau angka-angka, tetapi lebih berupa pernyataan-pernyataan yang merupakan penjelasan.

## **I.9 Sistematika Penulisan**

Bab I: Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian; Kerangka Pemikiran yang terdiri dari Konseptualisasi; dan Metodologi yang terdiri dari Ruang Lingkup Penelitian, Tipe Penelitian, Tehnik Pengumpulan Data, Tehnik Analisa Data dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Mendeskripsikan diplomasi *counter terrorism* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, baik bilateral yaitu dengan Amerika Serikat, Australia dan Kanada, serta kerja sama multilateral dengan negara-negara Asia Tenggara melalui ASEAN.

Bab III: Mendeskripsikan diplomasi *counter terrorism* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat dan Australia,

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

sedangkan pada kerja sama multilateral dengan negara-negara Asia Tenggara melalui ASEAN.

Bab IV: Kesimpulan.



## BAB II

### DIPLOMASI *COUNTER TERRORISM* INDONESIA PADA MASA Pemerintahan MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

#### II.1 Bom Bali I dan *Travel Warning*

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, telah terjadi peristiwa peledakan Bom Bali I pada 12 Oktober 2002 yang menelan 187 turis mancanegara tewas dan mencederai 300 orang lainnya.<sup>1</sup> Dan pada 5 Agustus 2003 ledakan bom kembali terjadi di Hotel JW Marriot yang menelan 12 orang tewas dan 149 lainnya cedera, termasuk 2 orang warga negara Amerika Serikat.<sup>2</sup>

Kedua peristiwa itu membuat beberapa negara di dunia yang selama ini menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan wisata oleh warga negaranya mengeluarkan *travel warning* bagi warga negaranya yang akan melakukan perjalanan wisata ke Indonesia dengan alasan keamanan dan perlindungan bagi warga negara mereka. Amerika Serikat dan Australia adalah dua negara yang selama ini aktif dalam memberikan *travel warning*. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia B. Lynn Pascoe menegaskan bahwa peringatan untuk tidak berkunjung ke suatu negara (*travel warning*) bagi warga Amerika Serikat adalah tanggung jawab pemerintah kepada warganya.<sup>3</sup> Sedangkan bagi Australia, *travel warning* yang dikeluarkan oleh pemerintah mereka bertujuan agar peristiwa

<sup>1</sup> Adjie. S, *Terorisme*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005, hal. 417.

<sup>2</sup> *Ibid.* hal.437.

<sup>3</sup> Evy Flamboyant, Amerika Pahami Kejengkelan Indonesia Soal Travel Warning, Kompas, 21 Desember, 2004.

terbunuhnya 22 orang warga negara mereka akibat aksi teror dalam peristiwa Bom Bali I di Jimbaran, Bali tidak terulang di kemudian hari.<sup>4</sup>

Travel warning yang dikeluarkan oleh dua negara tersebut tentu saja memberi dampak negatif bagi Indonesia. Dari segi pencitraan, Indonesia tentu saja dianggap sebagai sebuah negara yang tidak lagi aman untuk dikunjungi. Sektor pariwisata adalah yang terkena dampak paling besar secara langsung akibat adanya *travel warning*. Akibatnya adalah penurunan devisa negara yang cukup signifikan mengingat pemasukan dari sektor pariwisata adalah yang terbesar bagi devisa negara. Tercatat bahwa pada kisaran tahun 2002 ke 2003 terjadi penurunan yang cukup besar, yaitu 19% di bidang pariwisata.<sup>5</sup>

Berbagai langkah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata yang sempat sekarat akibat adanya *travel warning* beberapa negara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melobi negara-negara yang memberikan *travel warning* semacam Amerika Serikat dan Australia. Melalui pihak Departemen Budaya dan Pariwisata dan Departemen Luar Negeri untuk terus melakukan langkah-langkah diplomasi untuk meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia, khususnya Bali tetap aman.<sup>6</sup>

Pemerintah menghimbau agar negara-negara yang selama ini memberikan *travel warning* semisal Australia dan Amerika Serikat mencabut kembali *travel warning* yang telah mereka keluarkan. Selain itu, pemerintah juga mulai menggalakkan kembali pemulihan sektor pariwisata dengan membuat tiga

---

<sup>4</sup> Muhammad Atqa, Australia Terapkan Travel Warning Bagi Indonesia, *Kompas*, 4 Oktober 2005.

<sup>5</sup> Teror Bom dan Wisatawan AS, *Kompas*, 19 November 2005

<sup>6</sup> Travel Warning Pasca Bom Bali II Terus Berlanjut, dalam diakses tanggal 13 Februari 2007.

program untuk memulihkan sektor pariwisata Indonesia.<sup>7</sup> Tiga program itu adalah paket wisata dengan harga murah, program pertemuan, konferensi rapat, seminar skala nasional diadakan Bali serta program pelayanan media *center romos* wisata aman.

Namun, sangat disayangkan bahwasanya baik Amerika Serikat maupun Australia tidak mau bergeming untuk mencabut *travel warning* bagi warga negara mereka yang ingin berkunjung ke Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia belum menemukan cara yang tepat untuk mengatasi masalah terorisme.<sup>8</sup>

Pernyataan tersebut direspon positif oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah menerbitkan Perpu No. 01 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada tahun 2002 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>9</sup> Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa dibutuhkan sebuah perangkat hukum yang guna mengisi kekosongan hukum dalam penindakan kejahatan terorisme.

Tindakan pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri ini menunjukkan sebuah komitmen yang sangat tinggi terhadap pemberantasan terorisme. Ini disadari dan dipahami dengan sangat serius karena terorisme tidak dapat disamakan dengan tindakan kejahatan biasa, karena selain dilakukan secara sistematis professional dengan dan melalui sebuah jaringan yang terorganisasir yang berskala regional maupun internasional, memiliki tujuan politik atau ideologi dengan cara menimbulkan rasa takut, panik dan *chaos* di

<sup>7</sup> Pemerintah Tetapkan Tiga Program untuk Pulihkan Pariwisata Bali, dalam  
, diakses tanggal 13 Februari 2007.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Muhammad Imam Sidik, at al, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama, 2004, hal. 31.



masyarakat, sampai jatuhnya korban jiwa atas masyarakat yang tidak berdosa maka dibutuhkan sebuah perangkat hukum yang mengatur pemberantasan dan penindakannya secara khusus pula. Hal ini disebabkan pemerintah Indonesia selama ini tidak atau belum mempunyai sebuah hukum yang mengatur atau membahas mengenai kejahatan terorisme. Selama ini pemerintah hanya bertumpu pada UU no 12/ drt/ 1951 yang ditetapkan menjadi UU nomor 1/ 1991 tentang Senjata Api, UU no. 39/ 1999 tentang HAM, UU No. 26/ 2000 tentang Pengadilan HAM dan KUHP.<sup>10</sup>

## II.2 Kerja sama Bilateral

Dalam upaya *counter terrorism*, pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri telah telah mengesahkan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal tersebut adalah salah satu bentuk keberhasilan dari pemerintahan era Megawati Soekarno Putri. Namun di pihak lain, penanganan terorisme tidak bisa dilakukan oleh satu negara saja. Tetapi dibutuhkan kerja sama antar negara karena saat ini terorisme telah menjadi sebuah kejahatan internasional yang terorganisir yang tidak hanya mengancam eksistensi sebuah negara saja, melainkan semua negara dalam sistem internasional sehingga dibutuhkan bantuan dan dukungan dari semua negara dalam sistem internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukannya. Hal tersebut diperkuat oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 9.

Amerika Serikat Tom Ridge yang menyatakan bahwa ancaman terorisme dapat dicegah lewat kerja sama antarnegara.<sup>11</sup>

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, Indonesia berupaya untuk menggandeng banyak negara untuk melakukan kerja sama bilateral dalam upaya memerangi terorisme. Negara-negara yang menjadi partner Indonesia dalam masalah pemberantasan terorisme antara lain Amerika Serikat, Australia dan Kanada.

### II.2.1 Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah partner utama bagi negara-negara yang mempunyai komitmen sama dalam hal pemberantasan terorisme. Termasuk bagi Indonesia sebagai salah satu negara yang berkomitmen tinggi dalam hal pemberantasan terorisme. Indonesia melakukan kerja sama bilateral dalam banyak hal dengan Amerika Serikat terkait isu-isu terorisme. Sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Bush :

“America will help nations that need our assistance on combating terror. And America will hold to account nations that are compromise by terror, including those who harbor terrorist-because the allies of terror are the enemies of civilization. The Us and countries cooperating with us must not allow the terrorist to develop new home bases. Together we will seek to deny them in sanctuary”.<sup>12</sup>

Hal ini disebabkan karena Indonesia memainkan peranan kunci dalam menjamin keamanan di jalur laut strategis di Asia dan merupakan anggota berpengaruh ASEAN. Indonesia telah mencapai kemajuan yang penting dalam

<sup>11</sup> AS Minta Pemahaman RI Soal Terorisme, *Kompas*, 11 Maret 2004

<sup>12</sup> Raphael Perl, “Terrorism, The Future, and U.S. Foreign Policy”, Issue Brief for Congress, *Congressional Research Service*, 11 April 2003.

memajukan lembaga-lembaga demokrasi dan praktik-praktik demokrasi dalam waktu yang relatif singkat.<sup>13</sup>

Adapun bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan adalah dalam bentuk pelatihan dan pendidikan militer (*international military education and training*), pemberian dana bantuan untuk memerangi terorisme.

*International military education and training* (IMET) adalah bentuk kerja sama militer antara Amerika Serikat dan Indonesia. Kerja sama militer dapat didefinisikan sebagai tindakan atau operasi yang melibatkan komponen-komponen militer dua negara atau lebih, yang mana masing-masing pihak memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut atau saling diuntungkan satu sama lain.<sup>14</sup> Dapat juga diartikan sebagai menempatkan militer negara-negara sekutu (*allies*) dan negara-negara sahabat (*friends*) pada posisi sejajar dalam kerja sama bilateral maupun multilateral, dalam rangka mencapai tujuan keamanan bersama.<sup>15</sup>

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, Indonesia berada pada masa embargo militer. Hal ini terjadi akibat kasus Santa Cruz, Dili pada Timor Timur, November 1991, di mana Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) waktu itu dianggap bertanggung jawab.<sup>16</sup> Pada tragedi tersebut terhitung telah jatuh korban sipil sebanyak 7000 orang dan menyebabkan 75% kerusakan pada infrastruktur Timor Timur.<sup>17</sup> Sanksi Amerika Serikat tersebut

<sup>13</sup> Akuntabilitas HAM Tetap Ditagih, *Kompas*, 24 November 2005

<sup>14</sup> U.S. Department of Defense Military Dictionary, dalam \_\_\_\_\_, diakses tanggal 24 Desember 2006.

<sup>15</sup> Song Yimin, *The Security Strategy and Foreign Relations Have Entered a New Stage of Readjustment*, *Journal of International Studies*, summer 2002, hal. 2.

<sup>16</sup> Berharap Embargo Senjata Dihapus?, dalam \_\_\_\_\_, 27 Maret 2007.

<sup>17</sup> Donald Emerson, "Voting and Violence: Indonesia and East Timor in 1999", *Indonesia Beyond Soeharto: Polity, Society, Transition*, Armonk: M.E. Sharp, 1999. hal. 357.

berupa penghentian pendanaan, pelatihan dan transfer persenjataan dan perlengkapan militer.

Namun pasca tragedi 11 September yang dialami oleh Amerika Serikat, Presiden Bush menyatakan keinginan untuk memperkuat kerja sama bilateral dengan Indonesia dalam memerangi terorisme dan meningkatkan kerja sama militer dengan Indonesia. Anggota TNI akan dikirim ke Amerika Serikat untuk mengikuti berbagai macam konferensi, seminar dan pelatihan-pelatihan mengenai materi-materi tertentu seperti masalah reformasi militer, transparansi anggaran, penanganan bantuan kemanusiaan dan operasi pertolongan gabungan.<sup>18</sup>

Terkait dengan IMET, Amerika Serikat memberikan bantuan sebesar 400 ribu dollar AS yang diperuntukkan bagi program *Expanded-International Military Education and Training* (E-IMET) yang merupakan salah satu variasi dari program IMET<sup>19</sup> yang sempat dihentikan oleh Amerika Serikat. Selain itu, Bush juga menyatakan akan mencabut sanksi pada pasal yang mengatur mengenai penjualan senjata *non-lethal* bagi Indonesia.<sup>20</sup>

Untuk tahun fiskal 2002, Amerika Serikat memberikan bantuan senilai 4 juta dollar untuk mendanai partisipasi Indonesia dalam latihan multilateral bersama Amerika Serikat dan negara-negara Asia Tenggara lain dalam *Regional Counterterrorism Fellowship Program* yang meliputi kerja sama intelijen, kerja

<sup>18</sup> The White House Office of The Press Secretary, 19 September 2001, *Pernyataan bersama antara Amerika Serikat dengan Indonesia*, dalam [www.state.gov/regional/indo9194.htm](http://www.state.gov/regional/indo9194.htm).

<sup>19</sup> IMET merupakan program pelatihan bagi pejabat militer luar negeri, yang mana pemerintah AS mengalokasikan dana sebesar 50 juta dollar AS per tahunnya bagi program tersebut. Program ini merupakan proyek gabungan antara Pentagon, Departemen Luar Negeri dan divisi militer seperti Army Training and Doctrinal Command (TRADOC). Lihat dalam Angel Rabbasa dan John Haseman, *loc.cit.*

<sup>20</sup> The White House Office of The Press Secretary, *loc.cit.*

sama sipil-militer dalam memerangi terorisme dan keamanan maritim.<sup>21</sup> Militer Indonesia juga berpartisipasi dalam *Theater Security Cooperation Program* bersama *U.S. Pacific Command (USPACOM)* yang meliputi seminar-seminar yang mempromosikan kerjasama keamanan dalam upaya *counter terrorism*.<sup>22</sup> Pada bulan April 2002 Amerika Serikat juga memberikan bantuan sebesar 16 juta dollar AS, yang setengahnya digunakan untuk pelatihan Kepolisian Indonesia dan setengahnya lagi digunakan untuk melatih dan melengkapi unit-unit militer yang bertugas di daerah-daerah konflik.<sup>23</sup> Pada bulan yang sama, Deputy Asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat Peter Brooks mengunjungi Indonesia dalam rangka Dialog Keamanan AS-Indonesia I yang berlangsung selama 2 hari, sementara dialog kedua digelar pada pertengahan tahun 2003.<sup>24</sup>

Pada tanggal 2 Agustus 2002, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Colin Powell berkunjung ke Indonesia yang diterima oleh Presiden Megawati Soekarno Putri di Istana Negara. Adapun tujuan dari kunjungan Colin Powell adalah membicarakan kerja sama militer dengan Indonesia. Kerja sama tersebut dalam bentuk pelatihan militer, pendidikan militer internasional, pelatihan dalam program *International Military Education Training (IMET)*, dan program beasiswa kontraterorisme.<sup>25</sup> Dalam pertemuannya dengan Presiden Megawati Soekarno Putri tersebut Amerika Serikat menganggarkan bantuan sebesar 50 juta dollar AS bagi Indonesia yang dimaksudkan agar Indonesia mampu memerangi

<sup>21</sup> *Indonesia Gets U.S. Aid Against Terrorism*, BBC News, 2 Agustus 2002, dalam ..., 3 Januari 2007.

<sup>22</sup> *United States-Indonesia Military Relations*, *Congressional Record*, 11 Februari 2005, hal. 734.

<sup>23</sup> *Resuming U.S.-Indonesia Military Ties*, *Asia Briefing Paper*, 21 Mei 2002, International Crisis Group, 2002, hal. 1.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 2.

<sup>25</sup> *AS Berniat Jalin Kerja Sama Militer dengan Indonesia*, *Kompas*, 3 Agustus 2002

terorisme. Dana tersebut dialokasikan untuk peningkatan kemampuan polisi sebesar 47 juta dollar AS dan sisanya untuk pelatihan militer.

Pelatihan dan bantuan untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tahun fiskal 2001-2004 senilai 31 juta dollar AS. Khusus untuk peningkatan kemampuan tambahan polisi, yang termasuk di dalamnya pembentukan unit polisi khusus kontraterorisme, dianggarkan dana sampai 16 juta dollar AS pada tahun fiskal 2002 yang diambil dari anggaran tambahan darurat tahun fiskal 2002.<sup>26</sup> Untuk militer, disediakan beasiswa kontraterorisme regional yang memberikan pelatihan kontraterorisme dan hal-hal terkait dengan militer Amerika Serikat senilai 4 juta dollar AS pada tahun fiskal 2002-2003 (dari Ayat 8125 UU Bantuan Pertahanan 2002). Adapun dana IMET bagi militer Indonesia besarnya 400.000 dollar AS pada tahun fiskal 2003 jika disetujui Kongres. Ini merupakan tambahan bagi dana 400.000 dollar AS tahun fiskal 2002 yang digunakan untuk melatih warga sipil.<sup>27</sup>

## II.2.2 Australia

Indonesia dan Australia pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri melakukan kerja sama bilateral dalam usaha memerangi terorisme. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dirjen Multilateral Palsoskam Deplu-RI, Makmur Widodo dan Duta Besar Australia untuk Pemberantasan Terorisme, Les Luck :

“Indonesia dan Australia saat ini sedang mempersiapkan pembentukan pusat anti-teror yang nantinya akan berkedudukan di Jakarta,

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan fasilitas kepolisian kedua negara dalam menghalau terorisme”.<sup>28</sup>

Langkah kerja sama ini perlu dilakukan mengingat Australia adalah negara yang menyumbangkan korban terbanyak dalam kasus Bom Bali I yang terjadi di Jimbaran, Bali. Akibat dari peristiwa tersebut, Australia mengeluarkan *travel warning* bagi warga negaranya yang hendak berkunjung ke Indonesia. Akibatnya adalah merosotnya jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Pulau Bali pascatragedi peledakan bom tanggal 10 Oktober 2002, terus menyusut dari rata-rata sebelumnya 5.000 orang per hari, menjadi tinggal 700 orang per hari per 23 Oktober 2002.<sup>29</sup>

Adapun bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Australia adalah upaya pembentukan *trans-national crime centre*. Australia juga memberikan bantuan berupa dana untuk memerangi terorisme di Indonesia.

### II.2.2.1 Arti Penting Australia Bagi Indonesia

Australia adalah salah satu negara yang mempunyai peran penting bagi Indonesia dalam bidang ekonomi, pendidikan dan budaya. Hal itu merupakan aset penting dalam hubungan kedua negara yang perlu terus dipupuk dan dikembangkan, sehingga diharapkan akan memainkan peran penting dalam peningkatan hubungan kedua negara.

Di sektor pendidikan, terdapat sekitar 25.000 mahasiswa Indonesia yang saat ini belajar di Australia dan sebagian diantaranya adalah penerima beasiswa

<sup>28</sup> RI dan Australia Siapkan Pusat Anti Teror, dalam *Kompas*, 27 Maret 2007.

<sup>29</sup> Wisatawan Asing ke Bali Tinggal 700 Orang per Hari, *Kompas*, 2 November 2002

Pemerintah Australia, melalui AusAID. Mahasiswa Indonesia non-AusAID menyumbang sekitar 750 juta A\$ per tahun bagi perekonomian Australia, sementara beasiswa yang disediakan Australia bagi mahasiswa Indonesia bernilai 16,25 juta A\$ per tahun dan terdapat sekitar 250.000 pelajar/mahasiswa Australia yang mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Jika jumlah mereka digabungkan dengan jumlah masyarakat Australia yang sudah menguasai bahasa Indonesia tentunya akan cukup signifikan untuk memberikan pengaruh positif bagi peningkatan saling pengertian di antara kedua bangsa.<sup>30</sup>

Dalam bidang ekonomi, Australia adalah salah satu negara yang memiliki perekonomian terbaik di dunia. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong bagi Indonesia untuk meningkatkan kerja sama guna membantu perekonomian Indonesia keluar dari krisis sejak tahun 1997. Dalam bidang perdagangan, terdapat beberapa sinyal positif yang menandai kemajuan perdagangan kedua negara. Pada tahun 2003, perdagangan Indonesia-Australia mencapai 6,7 miliar A\$ (4,46 miliar US\$, meningkat 11% dibandingkan tahun 2002). Nilai ekspor Indonesia mencapai 4,053 miliar A\$ (2,65 miliar US\$) sementara nilai impor dari Australia mencapai 2,762 A\$ (1,8 miliar US\$). Dengan demikian pada tahun 2003 Indonesia menikmati surplus dalam perdagangannya dengan Australia sebesar 1,291 miliar A\$ (846 juta US\$). *Official Development Aid (ODA)* Australia untuk Indonesia adalah A\$ 160.8 juta terbesar kedua setelah Papua Nugini yang menerima sekitar A\$ 300 juta.<sup>31</sup> Walaupun perekonomian Indonesia didera krisis

<sup>30</sup> Imron Cotan, *Peluang dan Tantangan Hubungan Bilateral Indonesia-Australia*, dalam Ceramah Duta Besar LB & BP RI untuk Australia dan Vanuatu di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Andalas, Desember 2004.

<sup>31</sup> *Ibid.*



sejak tahun 1997, sekitar 400 perusahaan Australia yang beroperasi di Indonesia tetap mempertahankan roda bisnisnya dengan mitra mereka di Indonesia. Nilai investasi perusahaan-perusahaan Australia ini cukup berarti bagi Indonesia.<sup>32</sup>

### II.2.2.2 *Trans-national Crime Centre (TNCC)*

Saat ini, paling tidak terdapat dua isu yang memerlukan perhatian khusus pemerintahan kedua negara, yaitu ancaman terorisme dan imigran gelap. Ancaman terorisme sejauh ini telah berhasil dimanfaatkan untuk meningkatkan kerja sama, antara lain dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding on Counter Terrorism* yang antara lain meliputi kegiatan tukar-menukar informasi intelijen, menghidupkan kembali kerja sama dan pengembangan kemampuan antara agen penegak hukum.

*Trans-national crime centre* adalah sebuah lembaga yang didirikan dengan tujuan bukan hanya berusaha untuk memerangi teror, namun juga mengantisipasi sebelum aksi teror tersebut terjadi.<sup>33</sup> Dengan kata lain, pusat anti teror ini didirikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan fasilitas kepolisian kedua negara dalam menghalau terorisme.<sup>34</sup> *Trans-national crime centre* bertempat di Jakarta. Produk kerja sama RI-Australia ini lahir sebelum berlangsungnya Pertemuan Tingkat Menteri Kawasan Asia Pasifik untuk Memerangi Terorisme di Bali, 4-5 Februari 2004.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> RI dan Australia Siapkan Pusat Anti Teror, *loc.cit.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Kerja Sama Antiteror RI-Australia Bangun TNCC. . dalam diakses tanggal 10 Januari 2007.

Bantuan senilai A\$ 10 juta (Rp. 65 milyar) untuk memberantas terorisme juga sedang disiapkan untuk jangka waktu empat tahun. Prioritas bantuan untuk memperkuat kapasitas manajemen intelijen dalam tubuh POLRI dan mendirikan Pusat Koordinasi Kriminalitas Trans-nasional di Indonesia (*Transnational Crime Coordination Centre*).<sup>36</sup>

Bahkan Pemerintah Australia juga mengalokasikan dana tambahan A\$ 5 juta atau sekitar Rp 32,5 miliar kepada tim gabungan polisi Indonesia dan Australia yang menyelidiki pemboman di depan Gedung Kedutaan Besar Australia, Jakarta.<sup>37</sup>

Indonesia bersama Australia akan mengupayakan perluasan cakupan *Trans National Crime Centre* (TNCC) menjadi lembaga kerjasama di tingkat Asia Pasifik. Tujuannya adalah kerja sama itu akan meningkatkan efektivitas penanganan masalah terorisme.<sup>38</sup>

### II.2.2.3 Jakarta Centre of Law Enforcement Cooperation (JCLEC)

*Jakarta Centre of Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 3 Juli 2004. JCLEC bertempat di Akademi Polisi, Jalan Sultan Agung, Semarang.<sup>39</sup> Pembentukan

<sup>36</sup> *Kerjasama Pembangunan Indonesia - Australia*, Direktorat Pendanaan Luar Negeri, Bappenas.

<sup>37</sup> Australia Tambahkan Rp 32,5 Miliar untuk Penyelidikan Bom Kuningan, *Tempo*, 11 September 2004

<sup>38</sup> Indonesia Upayakan Perluasan Trans National Crime Centre, dalam *...*, diakses tanggal 10 Januari 2007.

<sup>39</sup> Presiden Resmikan Jakarta Centre of Law Enforcement Cooperation, dalam *...*, diakses tanggal 10 Januari 2007..

JCLEC bertujuan untuk menciptakan penyidik-penyidik yang berkualitas multiyurisdiksional dalam investigasi kejahatan transnasional.<sup>40</sup>

Dalam tahap pertama, ada 31 peserta yang akan mengikuti pelatihan di JCLEC. Sebanyak 21 orang berasal dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik, seperti negara-negara ASEAN, RRC, Fiji, Korea Selatan, Vanuatu, Timorleste, serta 10 peserta dari Indonesia dengan persyaratan berusia 26-40 tahun, mampu berbahasa Inggris, memiliki pendidikan dasar serse atau intel, serta bertugas di bidang serse atau intel dan memiliki kualifikasi kepangkatan setingkat perwira pertama atau kapten.<sup>41</sup> Selama dua hingga tiga minggu, para peserta akan mendapatkan enam jenis pelatihan. Yaitu *International Management of Serious Crime* (IMOSC), forensik, investigasi keuangan yang meliputi pencucian uang dan pembiayaan terorisme, intelijen, komunikasi, serta intelijen strategi dan riset. Materi-materi tersebut diberikan oleh 13 pengajar berkualifikasi andal. Dari Indonesia terdapat nama Irjen (Pol) Drs Made Mangku Pastika, Brigjen (Pol) Drs Goris Mere, dan Brigjen (Pol) Drs Edi Saparwoko. Adapun delapan pengajar lainnya dari luar negeri. Kurikulum JCLEC akan disusun oleh beberapa ahli dari berbagai negara, antara lain Mr Julian, pakar dari Australia, Irjen Made Mangkupastika, Brigjen (Pol) Edi Saparwoko, dan Brigjen (Pol) Gories Mere, pakar dari Indonesia, serta pakar-pakar lain dari Jerman, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Sedangkan peserta pelatihan antara lain dari negara Korea Selatan, Malaysia, Brunei, Laos, Timor Leste, Singapura, Fiji, dan Mozambik.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Menengok Sekolah Antiteror, *Suara Merdeka*, 4 Juli 2003.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> JCLEC dan Tuntutan Profesionalisme Polisi, *Kompas*, 1 Juli 2004.

Pemerintah Australia memberikan sumbangan AUD 38,3 juta selama 5 tahun. Termasuk di dalamnya tenaga ahli, dukungan teknis, dan kursus latihan internasional.<sup>43</sup> Dukungan Australia terhadap JCLEC adalah bagian dari paket senilai AUD 87 juta selama 4 tahun untuk memperkuat langkah antiterorisme regional termasuk penegakan hukum, pengawasan perbatasan dan keamanan penerbangan dan pelayaran.<sup>44</sup>

JCLEC bermanfaat bagi Polri karena memberikan pengalaman dalam menyelenggarakan pelatihan bertaraf internasional. Nilai strategis JCLEC, khususnya pada pelatihan tahap awal ini, adalah hadirnya pakar dari berbagai negara yang berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam penanganan pasca peledakan bom.

## **II.2.3 Kanada**

### **II.2.3.1 Sejarah Singkat**

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kanada dimulai sejak ditandatanganinya persetujuan kedua negara untuk masing-masing membuka perwakilan diplomatiknya pada tanggal 9 Oktober 1952.

Namun demikian secara historis hubungan keduanya sudah dimulai sejak tahun 1948, yaitu ditengah usaha Indonesia mencari dukungan politik serta pengakuan internasional di forum PBB atas kemerdekaannya yang diproklamasikan tiga tahun sebelumnya. Dalam hal ini peran Jenderal

<sup>43</sup> Menengok Sekolah Antiteror, *loc.cit.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

McNaughton (Kanada) sebagai Presiden DK-PBB –di tengah keadaan yang tidak menentu pada pasca PD II- sangat signifikan di dalam menentukan keberhasilan diadopsinya suatu resolusi yang pada akhirnya menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Kesungguhan dan konsistensi Kanada dalam membantu negara berkembang tidak berhenti disitu, namun terus berlanjut melalui program Colombo Plan tahun 1950-an.

Sejak tanggal 30 Juli 1997, Menlu RI Ali Alatas dan Menlu Kanada Loyd Axworthy telah menandatangani *Joint Declaration by the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Canada on the Establishment of a Bilateral Consultative Forum* guna membahas berbagai kepentingan bersama pada tingkat menteri maupun tingkat pejabat tinggi secara berkala guna meninjau pelaksanaan program yang disepakati serta untuk menyusun program bersama selanjutnya.<sup>45</sup>

### **II.2.3.2 Kerjasama Indonesia-Kanada**

Di mata Kanada, Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam percaturan ekonomi global dan memiliki potensi ekonomi yang cukup menjanjikan. Hubungan ekonomi bilateral Indonesia-Kanada selama ini telah menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Dalam tahun 2004 nilai perdagangan barang dua arah (*Two Way Trade*) mencapai US\$ 714,58. juta atau meningkat 8,1% dibandingkan tahun 2004 yang bernilai US\$ 516,55 juta. Peluang Indonesia untuk dapat lebih meningkatkan hubungan ekonomi dengan Kanada

<sup>45</sup> Sejarah Hubungan Diplomatik, dalam \_\_\_\_\_, diakses tanggal 24 Januari 2007.

secara optimal dapat dikatakan cukup besar potensinya sepanjang Indonesia dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan daya saing di pasar Kanada. Hal ini didukung oleh adanya prospek ekonomi Kanada yang menjanjikan, dimana Kanada diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan sebesar 2,75 % pada tahun 2004 dan 3,75% pada tahun 2005 serta daya beli yang cukup tinggi dengan pendapatan per kapita US\$ 26.539. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kanada (khususnya dalam sektor perdagangan eceran), maka perkembangan ini diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi hubungan ekonomi bilateral Kanada-Indonesia. Hal ini tercermin dari kegiatan ekspor Indonesia ke Kanada mengalami kenaikan 4,8% pada periode Januari-April 2004, yaitu dari US\$ 203,8 juta (Januari-April 2003) menjadi US\$ 213,5 juta.<sup>46</sup>

Tekstil dan produk tekstil masih merupakan mata dagangan ekspor utama Indonesia ke Kanada. Mata dagang ekspor utama Indonesia yang memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap peningkatan ekspor Indonesia (Januari – April 2004) selain produk sepatu, peralatan dapur, biji coklat, biji tembaga, kopi, baja dan rempah-rempah, adalah produk.<sup>47</sup>

1. Karet alam (senilai US\$ 38,4 juta)
2. Pakaian (sebesar US\$ 30,4 juta)
3. Elektronik (sebesar US\$ 28,8 juta)
4. Meubel (sebesar US\$ 13,1 juta)

<sup>46</sup> Hubungan Bilateral RI-Kanada, dalam *www.jakarta centre for law enforcement coop. Hubungan Bilateral RI - Kanada.html*, diakses tanggal 24 Januari 2007.

<sup>47</sup> *Ibid.*

5. Kayu (senilai US\$9,3 juta)
6. Mesin dan peralatan mesin (sekitar US\$ 9,2 juta)

Sedangkan komoditi impor utama Indonesia yang cukup substansial dari Kanada selain bahan kimia, plastik, kertas, adalah mencakup:<sup>48</sup>

1. *Pulp pulp of wood* (senilai 46,2 US\$ juta)
2. Gandum (naik dari US\$ 162,7 ribu (Januari-April 2003) menjadi US\$ 38,1 juta). Dalam skala bilateral, Indonesia merupakan pasar produk pertanian Kanada terbesar kedua di antara negara-negara ASEAN setelah Filipina
3. Mesin dan peralatan mesin (senilai US\$ 29,6 juta)
4. Pupuk (senilai US\$ 23,9 juta)

Sedangkan di bidang investasi, sektor utama investasi langsung Kanada di Indonesia adalah di dalam bidang pertambangan, minyak dan gas, keuangan, jasa, lingkungan dan *agrifood*. Indonesia merupakan negara tujuan investasi terbesar kedua setelah Jepang dan Singapura. Bahkan investasi tunggal Kanada di Asia berada di Indonesia yaitu perusahaan tambang PT. INCO di Soroako, Sulawesi Selatan dengan nilai investasi sekitar Can\$ 3,5 – 4 milyar (US\$ 2,5 –US\$ 2,9). Nilai akumulatif Investasi Langsung (FDI) Kanada di Indonesia tahun 2003 sebesar Can\$ 5,4 milyar (US\$ 3,9 milyar). Sedangkan total investasi Kanada di

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

Indonesia hingga awal tahun 2004 telah mencapai lebih dari Can\$ 6,3 miliar dan perusahaan-perusahaan Kanada telah mempekerjakan ribuan warga Indonesia.<sup>49</sup>

Berdasarkan sejarah, kerjasama politik antara telah dimulai sejak 9 Oktober 1952.<sup>50</sup> Bahkan sejak 30 Juli 1997, Indonesia-Kanada telah menandatangani *Joint Declaration by the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Canada on the Establishment of a Bilateral Consultative Forum*.

Joint Statement terakhir yang disetujui oleh kedua Menlu dihasilkan dalam pertemuan bilateral yang diadakan disela-sela sidang ARF/ PMC/ AMM di Jakarta pada tanggal 1-2 Juli 2004 berisi antara lain:<sup>51</sup>

1. Persetujuan pencapaian tujuan bersama dalam menciptakan perdamaian, keamanan regional dan internasional, dan pengakuan akan pentingnya peningkatan kerjasama antara Indonesia-Kanada melalui pemikiran peningkatan kinerja ARF (*ASEAN Regional Forum*). Dalam hal inisiatif keamanan regional, sejak tahun 1990, Kanada melalui *Canadian International Development Agency (CIDA)* telah mensponsori usaha Pemerintah Indonesia untuk melakukan diplomasi preventif di Laut Cina Selatan (*South China Sea*) melalui penyelenggaraan Lokakarya tentang *Managing Potential Conflicts in the South China Sea*;

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Sejarah Hubungan Diplomatik, *loc.cit.*

<sup>51</sup> Hubungan Bilateral RI-Kanada, *loc.cit.*



2. Komitmen bersama untuk meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral dalam merespon terorisme serta mendukung kinerja JCLEC. Kanada berjanji membantu Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme. Selama dua tahun terakhir ini, pemerintah Kanada telah memberikan bantuan *counter terrorism capacity building* kepada Indonesia dan keduanya akan terus menilai peluang dimana keduanya dapat bekerjasama dimasa depan. Inisiatif Menlu RI, Hassan Wirajuda, untuk mengembangkan pendekatan regional dalam usaha pemberantasan terorisme Asia Tenggara disampaikan pada *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan pertemuan ASEAN PMC 10 + 10 di Phnom Penh. Hal ini dinilai Kanada sebagai model yang dapat ditiru kawasan lain dalam strategi memberantas terorisme internasional. Dalam perkembangannya, Indonesia tengah membentuk kerjasama dengan Kanada di bidang *Counter-Terrorism on Nuclear, Biological and Chemical Weapons* (CT-NBC) dalam bentuk program *Training for Trainers* melalui pengiriman tenaga pelatih untuk melatih aparat Indonesia. Pihak Kanada mengharapkan kerjasama ini dapat ditujukan untuk membantu program JCLEC (*Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation*);
3. Komitmen kedua pemerintah untuk bersama meningkatkan hubungan komersial dan ekonomi bilateral, dengan menekankan pada usaha untuk peningkatan iklim investasi serta perdagangan volume perdagangan bilateral. Keduanya juga setuju untuk mengadakan *Canada-ASEAN Trade and Investment Summit and Business Forum* di Toronto (Mei 2005) yang

akan memfokuskan pada peluang bagi kerjasama ekonomi antara Canada dan ASEAN;

4. Kesepakatan kedua Menlu untuk meningkatkan kerjasama bilateral untuk mendukung tujuan bersama dalam hal pengembangan demokrasi, pluralisme dan perlindungan HAM. Selama ini dukungan Kanada dalam penciptaan demokrasi, good governance di Indonesia terlihat dalam bantuan dana yang dikeluarkan bagi pelaksanaan Pemilu 1999 (Juni), Pemilu 2004 (April) sebesar Can\$ 5 juta untuk kepentingan Voters Education. Dalam penegakan HAM, sebagai realisasi awal dari MOU sebelumnya (30 Juli 1997), telah diadakan *Indonesia-Canada Human Rights Colloquium* di Jakarta pada tanggal 28-30 Oktober 1997 dan selanjutnya *the 2nd Indonesia-Canada Bilateral Human Rights Dialogue* (31 Agustus – 1 September 2004) yang berlangsung di Ottawa. RI juga mendapatkan bantuan (*pledge*) keuangan sebesar Can\$ 700.000 bagi upaya perjanjian damai GAM-RI (9 Desember 2000) serta Can\$ 500.000 bagi pelaksanaan perjanjian *Aceh Cessation of Hostilities Agreement* (COHA);
5. Kesepakatan kedua negara dalam mendukung perluasan dialog dan pertukaran pelajar antara Indonesia dan Kanada dalam studi Islam dan pluralisme serta peningkatan dialog antar agama (*Inter-Faith Dialogue*).

## II.3 Kerjasama Multilateral

Selain menggandeng beberapa negara untuk melakukan kerjasama bilateral dalam upaya memerangi terorisme, Presiden Megawati Soekarno Putri juga menggunakan forum-forum internasional yang dihadiri banyak negara untuk ikut serta dalam upaya pemberantasan terorisme.

### II.3.1 ASEAN Security Community (ASC)

*ASEAN security community* adalah gagasan pemerintah Indonesia yang menunjukkan kemampuan Indonesia sebagai salah satu negara yang masih patut disegani di kawasan Asia Tenggara, bahkan Asia. Keputusan dan langkah yang diambil pemerintah RI untuk memprakarsai *ASEAN security community* merupakan sumbangan konkret bagi perkembangan ASEAN. Sekaligus, prakarsa ini menandai pula kembalinya Indonesia menjalankan peranan alamiahnya memberikan pimpinan dan arah kepada ASEAN. Ide mengenai *ASEAN security community* ini benar-benar menjadi sebuah topik yang menarik ketika Indonesia mengajukan ide tersebut pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN IX yang diadakan pada tanggal 7-8 Oktober 2003 di Nusa Dua Bali.<sup>52</sup> Pertemuan ini dihadiri oleh 10 negara ASEAN, juga 3 negara Asia Timur yaitu Cina, Jepang dan Korea Selatan.<sup>53</sup>

*ASEAN security community* akan berfungsi sebagai road map bagi kawasan ini guna bebas dari kemungkinan timbulnya konflik-konflik menjelang atau pada tahun 2020. Dalam konsep ini tercakup antara lain mekanisme

<sup>52</sup> Indonesia Usulkan ASEAN Security Community, *Kompas*., 26 Mei 2003.

<sup>53</sup> *Ibid*

penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota ASEAN guna mencegah timbulnya perang di kawasan Asia Tenggara. Di dalamnya juga akan termasuk kesepakatan-kesepakatan mengenai berbagai aspek kerja sama politik dan keamanan dan prinsip-prinsip serta mekanisme untuk memajukan kerja sama dan dialog politik dan keamanan, tetapi tidak bermuara pada pembentukan pakta militer/pertahanan.<sup>54</sup> Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda :<sup>55</sup>

“*ASEAN Security Community* ini bukan berarti dimaksudkan sebagai pakta pertahanan atau kerjasama militer, tapi dalam arti luas, yang mencakup politik, perdamaian dan sebagainya. Hal ini untuk menghindari kasus seperti Irak, yang mana krisis tersebut terjadi karena kegagalan organisasi regional dalam mengembangkan kerjasama politik yang mengakibatkan masuknya negara lain sebagai pihak ketiga untuk melakukann sesuatu”.

Prinsip-prinsip terpenting yang tetap harus dipertahankan dalam *ASEAN security community*, termasuk:<sup>56</sup>

1. Menghormati kedaulatan sesama negara anggota. Prinsip ini akan tetap merupakan prinsip paling tinggi yang mengatur hubungan satu sama lain dengan pengertian bahwa dimana perlu negara-negara anggota memberi wewenang tertentu kepada ASEAN sebagai lembaga.
2. Prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama anggota. Penerapannya perlu dilakukan secara fleksibel

<sup>54</sup> Wisber Loeis, Mewujudkan “ASEAN Security Community”, *Pikiran Rakyat*, 15 September 2003.

<sup>55</sup> Indonesia Usulkan ASEAN Security Community, *Loc.cit.*

<sup>56</sup> Wisber Loeis, *loc.cit.*

sesuai dengan semangat kerja sama dalam *ASEAN security community*.

3. Pengambilan keputusan secara konsensus. Mungkin ASEAN harus membedakan antara isu penting yang memang memerlukan keputusan konsensus dan isu-isu teknis yang dapat diputuskan dengan pendekatan lain.
4. Penolakan mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Prinsip ini merupakan unsur penting didalam TAC. Di dalam *ASEAN security community*, unsur perlu ditingkatkan statusnya dari *declaration of intent* menjadi operasional.

Pembentukan *ASEAN security community* sesungguhnya merupakan satu paket dengan pembentukan ASEAN atau *East Asia Community* yang diharapkan bisa terbentuk tahun 2020 mendatang. *ASEAN security community* merupakan salah satu dari tiga pilar dari Bali Concord II, disamping *ASEAN Economic Community* dan *ASEAN Social Cultural Community*.<sup>57</sup> Konsep komunitas keamanan ASEAN dianggap sebagai kerja sama politik dan keamanan dalam arti luas, tidak hanya dalam pengertian kerja sama militer, namun sebagai padanan dari konsep komunitas ekonomi ASEAN.<sup>58</sup> Hal ini mengacu pada Visi ASEAN 2020 yang dicetuskan pada KTT ASEAN 1997. Melalui visi tersebut, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk mempererat kesatuan dan integrasi

<sup>57</sup> Pertemuan Menlu ASEAN Sepakat Rekomendasikan Bali Concord II, *Kompas*, 5 Oktober 2003.

<sup>58</sup> RI akan Usulkan Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN, *Pikiran Rakyat*, 27 Agustus 2003.

ekonomi serta memutuskan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara lain dengan "menerapkan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dan mempercepat liberalisasi perdagangan".

Namun dalam perkembangannya, kerja sama tersebut perlu dikembangkan. Tidak hanya pada masalah ekonomi saja, namun juga pada masalah kerja sama politik dan keamanan di antara negara-negara Asia Tenggara yang nantinya diharapkan dapat membantu integrasi ASEAN pada tahun 2020.<sup>59</sup> Dengan *ASEAN security community* memungkinkan ASEAN mencapai satu komunitas dengan tingkat keamanan yang menyeluruh atau komprehensif.<sup>60</sup> Dan pada Bali Concord II ini, tentang keberadaan Dewan Kehormatan (*High Council*) ASEAN.

Dalam hal *counter-terrorism*, *ASEAN security community* dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin kerja sama dalam upaya memerangi terorisme. Sebab, terorisme sudah tidak mengenal batas wilayah sehingga dibutuhkan kerjasama untuk mengatasinya. Hal ini disebabkan karena terorisme adalah persoalan global yang mengancam stabilitas dan kesejahteraan ekonomi semua orang di seluruh dunia. Maka dari itu terorisme menjadi permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh satu negara atau satu kelompok saja, namun harus melalui kerja sama. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dalam pidato pembukaan *Bali Regional Ministerial Meeting on Counter-Terrorism (BRMMCT)* di Nusa Dua, Bali pada tanggal 4 Februari 2004:<sup>61</sup>

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> SOM ASEAN Sepakati Konsep ASC, *Kompas.*, 13 September 2003.

<sup>61</sup> Ancaman Terorisme tak Mengenal Batas, *Pikiran Rakyat*, 5 Februari 2004.

“Semangat kerja sama dapat membantu mengatasi ancaman terorisme yang cenderung kian bergerak tanpa mengenal batas wilayah, nasionalitas ataupun agama. Itulah sebabnya kerja sama antar bangsa, baik dalam skala regional maupun internasional dalam menghadapi terorisme menjadi sangat perlu”.

Pernyataan Presiden Megawati Soekarno Putri tersebut mendapat dukungan dari Jaksa Agung Amerika Serikat John Ashcroft. Ia menyatakan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat berhasil sepenuhnya dalam memerangi terorisme. Hal itu memerlukan kerja sama semua pihak.<sup>62</sup>

Kerja sama harus dilakukan melintasi batas nasional dan regional mengingat jaringan operasi teroris yang juga lintas nasional dan regional. Dan diharapkan kerja sama tersebut dapat menciptakan sebuah mekanisme dan prosedur yang memungkinkan pertukaran informasi intelijen dapat berlangsung lebih akurat, lebih cepat dan lebih efektif diantara negara-negara ASEAN. Termasuk di antaranya pelatihan antiteror, pendidikan teknologi forensik dan pertukaran pakar terorisme, Dengan demikian nantinya diharapkan stabilitas keamanan yang selama ini menjadi cita-cita ASEAN bisa terwujud karena dengan adanya kerjasama tersebut dapat memutus akses teroris baik dalam hal memperoleh senjata dan menghadapi serangan-serangan masif teroris. Apabila hal ini dapat dilakukan maka jaringan dan sel-sel kegiatan teror yang terbangun rapi, rapat, dan tertutup dapat ditembus.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

## **DIPLOMASI *COUNTER TERRORISM* INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

### **III.1 Upaya Normalisasi Kerja Sama Militer Amerika Serikat-Indonesia dan Kerja Sama Indonesia-Australia**

Pada awal masa pemerintahannya, Susilo Bambang Yudhoyono sudah dihadapkan pada sebuah permasalahan yang cukup pelik, yaitu terorisme. Berbagai langkah diplomasi untuk memerangi terorisme di Indonesia pun dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti halnya Presiden Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono pun melakukan langkah serupa dalam memerangi terorisme, yaitu melakukan kerja sama dengan beberapa negara, baik secara bilateral maupun multilateral, dalam memerangi terorisme.

Namun, dalam prakteknya upaya diplomasi yang dilakukan dalam upaya memerangi terorisme (*counter terrorism*) pada masa Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat dikatakan mudah. Hal ini disebabkan oleh masih berlakunya embargo militer oleh Amerika Serikat yang menyebabkan kurang memadainya teknologi persenjataan TNI yang berdampak pada kurang maksimalnya kerja TNI dalam memerangi terorisme di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono ialah diplomasi dalam upaya normalisasi hubungan bilateral dengan Amerika Serikat, terutama dalam kerja sama militer.



Normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat perlu dilakukan, walaupun pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri Amerika Serikat telah mencabut embargo militer dalam pasal pembelian perlengkapan militer *non-lethal*, namun hal ini dirasa masih kurang. Dengan normalisasi, maka kerja sama militer yang sempat terhenti oleh diberlakukannya embargo militer bisa dilaksanakan kembali. Isu terorisme digunakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam melakukan upaya diplomasi normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat sebab sejak peristiwa 11 September Amerika Serikat sangat gencar memerangi terorisme global dan tidak segan membantu negara-negara yang mempunyai misi serupa.

Kerja sama yang sudah terjalin antara Indonesia dan Australia dalam memerangi terorisme juga menjadi sorotan utama. Hal ini bisa dilihat dari upaya peningkatan kerja sama antara dua negara tersebut dalam memerangi terorisme, tidak hanya dalam lingkup bilateral, namun juga dalam lingkup regional.

## **III.2 Kerja Sama Bilateral**

### **III.2.1 Amerika Serikat**

Kasus Timika menjadi ganjalan serius hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat telah mengeluarkan sertifikasi bahwa pemerintah Republik Indonesia telah bertindak kooperatif terhadap investigasi kasus penembakan dua warga Amerika Serikat di Timika yang diduga dilakukan oleh TNI. Namun, berdasarkan hasil investigasi tim gabungan TNI dan FBI, penembakan itu dilakukan oleh Anthonius Wamang

(anggota OPM). Akibatnya adalah sulitnya bagi Indonesia untuk keluar dari embargo militer Amerika Serikat yang telah berlangsung selama 13 tahun yang berimbas pada mempersulit TNI dalam meningkatkan kemampuan persenjataan dan alih teknologi.

Namun, Amerika Serikat tetap memandang Indonesia sebagai partner yang memiliki peran sangat penting dalam kerjasama pemberantasan terorisme. Pernyataan ini diungkapkan oleh Senator James A. Leach pada dengar pendapat mengenai Indonesia di Komisi Hubungan Internasional Kongres :

“There is no country in the world of such vital significance to the United States than Indonesia”.<sup>1</sup>

Hal ini terbukti dengan keinginan Amerika Serikat yang bertekad memulai kembali hubungan kerja sama militer dengan Indonesia. Pada bulan Februari 2005, Menteri Luar Negeri Condoleeza Rice yang berkunjung ke Indonesia mencabut pembatasan atas partisipasi Indonesia dalam IMET. Lebih jauh mariner Indonesia diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam latihan *counterterror* gabungan dengan pihak Angkatan Laut Amerika Serikat pada bulan Mei,<sup>2</sup> meski kasus pelanggaran HAM TNI masih belum terselesaikan secara runtus.<sup>3</sup> Pada kesempatan itu juga, pemerintah Indonesia meminta percepatan normalisasi

<sup>1</sup> Leslie B. Curtin, *Toward a New Foreign Policy in Indonesia, The Islamic Giant in Southeast Asia*, Fundamental of Strategic Logic, National Defense University, dalam \_\_\_\_\_, diakses tanggal 3 Januari 2007.

<sup>2</sup> *US, Indonesia Navies Hold Joint Anti-Terror Exercises*, Oster Dow Jones, 10 Mei 2005.

<sup>3</sup> Penyelesaian kasus penembakan dua warga Negara AS di Timika-Papua yang terjadi pada 2002 dirasa tidak memuaskan karena dugaan keterlibatan anggota TNI dalam pembunuhan tersebut yang walaupun pada akhirnya tidak terbukti; Pengadilan Indonesia juga telah membebaskan 16 anggota militer yang terlibat dalam pelanggaran HAM di Timor Timur. Lihat dalam Karl Schoenberger, *Indonesian Military Using Terror Fears to Regain Power*, Knight Ridder Tribune News Service, 21 Maret 2003.

pasca-embargo militer yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat dan meminta pemulihan program *International Military Education and Training* (IMET).<sup>4</sup>

Langkah awal normalisasi hubungan Amerika Serikat-Indonesia adalah ketika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice telah mengizinkan para anggota TNI untuk mengikuti kembali *International Military Education and Training Program* (IMET) yang berharga sekitar 600.000 dollar AS per tahun pada bulan Februari 2005.<sup>5</sup>

Pada tanggal 24-27 Mei 2005, Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan ke Amerika Serikat dalam rangkaian kunjungan kerja selama empat hari.<sup>6</sup> Kunjungan tersebut akan membahas masalah Timika yang terkait dengan program *International Military Education and Training* (IMET) dan embargo suku cadang senjata, dan juga dimaksudkan untuk lebih mempererat hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat, termasuk menarik investasi dari Amerika Serikat ke Indonesia.<sup>7</sup> Dan pada kunjungan di bulan November 2005, Indonesia mendapatkan hasil positif. Presiden Bush mengatakan bahwa Amerika Serikat akan meningkatkan kerja sama militer dengan Indonesia, dengan mencabut embargo pada pasal mengenai penjualan persenjataan *non-lethal* seperti kendaraan untuk transportasi dan perlengkapan komunikasi dengan tetap memperhatikan penyelesaian kasus HAM TNI. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Juru Bicara Gedung Putih Sean McCormack bahwa :

<sup>4</sup> Hadirnya Rice Cerminkan Apresiasi AS, *Kompas*, 14 Maret 2006,

<sup>5</sup> AS Ingin Mulai Kerja Sama Militer dengan RI, *Kompas*, 7 Mei 2005

<sup>6</sup> Yudhoyono Memulai Kunjungan di AS, *Pikiran Rakyat*, 26 Mei 2005

<sup>7</sup> *Ibid.*

“The administration planned to help Indonesian military, but that Washington remained committed to pressing for accountability for past human right abuses”.<sup>8</sup>

Pemberian ijin pembelian perlengkapan *non-lethal* oleh Amerika Serikat dapat digunakan oleh TNI untuk mengembangkan 3 kemampuan, yaitu: mengembangkan kemampuan gerak pasukan dan pengadaan bagi upaya penanggulangan kekerasan komunal, *insurgency* dan terorisme; untuk memperkuat patroli maritim oleh Angkatan Laut karena kemampuan di bidang ini menjadi penting mengingat besarnya ancaman berbasis maritim di wilayah perairan Indonesia; memperkuat kemampuan pengintaian udara oleh Angkatan Udara dan mendukung patroli maritim Angkatan Laut.<sup>9</sup> Selain itu, Amerika Serikat juga memberikan bantuan dana sebesar Rp 5,5 miliar untuk program IMET tahun 2005.<sup>10</sup>

Bagi Amerika Serikat sendiri, langkah kerjasama di bidang militer ini perlu dilakukan mengingat akan banyaknya aset yang dimiliki Amerika Serikat di Indonesia. Kerjasama tersebut, terutama pencabutan embargo militer oleh Amerika Serikat, akan mampu meningkatkan kemampuan TNI dalam menghadapi ancaman dan keamanan yang nantinya juga akan berimbas pada terlindunginya semua aset Amerika Serikat yang berupa investasi sebesar US\$ 25 milyar. Selain itu, Indonesia juga merupakan pangsa pasar yang besar bagi produk Amerika Serikat yang besarnya mencapai US\$ 2,5 milyar pada 2005. Dan keamanan

<sup>8</sup> Chris Brummit, *US Lifts Embargo on Indonesia Arms Sales*, Associated Press Writer, dalam *...*, diakses tanggal 3 Januari 2007.

<sup>9</sup> *US-Indonesia Relations; Searching for Cooperation in The War Against Terrorism*, Asia Pacific Center for Security Studies, no.2, Mei 2003.

<sup>10</sup> Latihan Kopaska TNI AL-US Navy Seal Bukti IMET Telah Dibuka Kembali, *Kompas*, 14 Mei 2005.

tersebut juga diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi warga negara Amerika Serikat di Indonesia yang mencapai 36 ribu jiwa.<sup>11</sup>

Perbaikan hubungan militer Amerika Serikat-Indonesia juga tampak pada kenaikan signifikan rancangan alokasi anggaran Pemerintah Amerika Serikat untuk pemberian pinjaman militer asing (*Foreign Military Financing/FMF*) ke Indonesia, dari sebelumnya 1 juta dollar AS menjadi 15,7 juta dollar AS. Selain itu, rancangan anggaran *State Department* Pemerintah Amerika Serikat tahun 2008 juga mengusulkan kenaikan alokasi anggaran untuk program IMET bagi Indonesia, dari 938.000 dollar AS menjadi 974.000 dollar AS.<sup>12</sup>

### III.2.2 Australia

Setelah sukses melakukan kerjasama di bidang *counterterror* dengan memprakarsai berdirinya *Trans-national Crime Centre* (TNCC) dan *Jakarta Centre of Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) pada masa pemerintahan Megawati, baik Indonesia maupun Australia tetap melakukan kerja sama di bidang *counterterror*. TNCC adalah sebuah lembaga yang didirikan dengan tujuan bukan hanya berusaha untuk memerangi teror, namun juga mengantisipasi sebelum aksi teror tersebut terjadi.<sup>13</sup> Sedangkan JCLEC adalah lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk menciptakan penyidik-penyidik yang berkualitas multiyurisdiksional dalam investigasi kejahatan transnasional.<sup>14</sup> Kedua

<sup>11</sup> Leslie B. Curtin, *loc.cit.*

<sup>12</sup> Kerja Sama Militer AS dan Indonesia Makin Membaik, *Kompas*, 19 April 2007

<sup>13</sup> RI dan Australia Siapkan Pusat Anti Teror, dalam *...*, diakses tanggal 27 Maret 2007.

<sup>14</sup> Menengok Sekolah Antiteror, *Suara Merdeka*, 4 Juli 2003.

lembaga ini bertempat di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang.<sup>15</sup> Dipilihnya Indonesia sebagai tempat didirikannya TNCC dan JCLEC adalah sebuah pengakuan akan kemampuan Indonesia yang mampu mengungkap kasus-kasus teroris, terutama pengungkapan kasus bom di Kuta, Bali, Oktober 2002 yang merenggut lebih dari 200 korban jiwa dan mencederai ratusan orang lainnya.<sup>16</sup> Tak kurang, Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer mengakui keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam menangkap dan mengadili lebih dari 170 teroris sejak tahun 2000, termasuk orang-orang yang berperan dalam tragedi bom Bali 2002 dan 2005, serangan pada Hotel JW Marriot dan Kedutaan Besar Australia di Jakarta serta beberapa orang yang diduga berperan dalam kerusuhan di Wonosobo dan Poso.<sup>17</sup>

Kebijakan Australia untuk memberantas teroris di Indonesia, bantuan keuangan untuk intelijen dan pengawasan di daerah perbatasan akan terus dilanjutkan. *Trans National Crime Center* yang dibentuk berdasarkan bantuan program *Australia Development Program* dan Polisi Federal Australia telah beroperasi penuh. Untuk tahun 2004 ini, total bantuan Australia kepada Indonesia adalah 160.8 juta dolar Australia.<sup>18</sup> Dan bahkan dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak 8 Desember 2004 Australia berencana menaikkan bantuannya sebesar 2 kali lipat, yaitu dari 10 juta dolar Australia menjadi 20 juta dolar

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Pidato Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen (Pol) Drs Paiman yang disampaikan pada pembukaan TNCC dan JCLEC pada 3 Juli 2004. lihat *ibid.*

<sup>17</sup> Kita Berhutang pada Masyarakat untuk Memerangi Terorisme, dalam *...*, diakses tanggal 24 Januari 2007.

<sup>18</sup> Pentingnya Memelihara Hubungan Bilateral Indonesia dan Australia, dalam *...*, diakses tanggal 24 Januari 2007.

Australia untuk program *counter terrorism*.<sup>19</sup> Peningkatan alokasi dana juga berlaku pada program *Jakarta Centre of Law Enforcement Cooperation (JCLEC)*. Australia memberikan bantuan sebesar 36,8 juta dollar Australia untuk biaya operasional *counter-terrorism*, baik di tingkat bilateral maupun regional.<sup>20</sup> Dan alokasi dana bagi program *Transnational Crime Center (TNCC)* mencapai 4,7 juta dollar Australia yang digunakan oleh Polri untuk mencegah dan mengidentifikasi segala bentuk kejahatan transnasional, termasuk terorisme.<sup>21</sup>

Kerja sama yang juga telah berjalan dan telah dilaksanakan selama ini antara pemerintah Australia dan Indonesia adalah meliputi penegakan hukum, pengawasan perbatasan dan membangun kerangka legislasi untuk mencegah terorisme.<sup>22</sup> Kerjasama ini cukup efektif dalam memutus akses teroris dalam mendapatkan senjata mematikan non-konvensional, memperbaiki penegakan hukum, kerjasama intelijen dan untuk menghadapi serangan-serangan masif teroris.

Kerja sama tersebut kembali terjadi dengan terselenggaranya Konferensi Sub Regional Tingkat Menteri Luar Negeri (Menlu) mengenai *counte- terorisme* pada tanggal 5-6 Maret 2007 di Jakarta.<sup>23</sup> Konferensi tersebut merupakan kelanjutan dari *Bali Regional Ministerial Meeting on Counter Terrorism* yang diadakan pada bulan Februari 2004 yang dihadiri oleh 20 menteri dari Asia Tenggara dan Pasifik dan karena konferensi itu merupakan usul Menlu Indonesia

<sup>19</sup> Australia Raises Counter-Terrorism Assistance To Indonesia, dalam \_\_\_\_\_, diakses tanggal 24 Januari 2007.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Pentingnya Memelihara Hubungan Bilateral Indonesia dan Australia, *loc.cit.*

<sup>23</sup> Indonesia Akan Selenggarakan Konferensi Kontra-Terorisme, *Gatra*, 25 Februari 2007

dan Menlu Australia maka konferensi tersebut akan diketuai bersama oleh Menlu Indonesia Hassan Wirajuda dan Menlu Australia Alexander Downer.

Salah satu program yang akan dibicarakan adalah upaya kerja sama de-radikalisasi terorisme dengan sejumlah negara Islam, untuk mengurangi ancaman tindak pidana terorisme. program yang telah diterapkan di sejumlah negara termasuk Eropa dan Amerika Serikat itu bertujuan untuk memberikan pelurusan kembali tentang makna Islam, terutama dari salah pemahaman makna *jihad*. Program tersebut dirasa perlu dilakukan karena pada kenyataannya, pendekatan *hard power* dalam memerangi terorisme dinilai dunia hanya akan menyuburkan aksi-aksi teror yang lebih luas dan kejam sehingga mulai beralih ke pendekatan yang lebih beradab atau *soft power* seperti pendekatan agama sebagai bentuk de-radikalisasi.<sup>24</sup>

### III.3 Kerja Sama Multilateral

Terorisme ditempatkan sebagai kejahatan yang tergolong luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini mengacu pada kenyataan bahwa terorisme dilakukan oleh penjahat-penjahat yang tergolong profesional, produk rekayasa dan pembuktian kemampuan intelektual, terorganisir dan didukung dana yang tidak sedikit. Selain itu, kejahatan ini bukan hanya menjatuhkan kewibawaan suatu negara dan bangsa, namun juga mengakibatkan korban rakyat tidak berdosa yang tidak sedikit.<sup>25</sup>

Terorisme juga termasuk dalam *trans-national crime* karena kejahatan ini sudah tidak mengenal batas negara. Aksi terorisme yang terjadi di satu tempat,

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Abdul Wahid, at al, *Kejahatan Terorisme : Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2004, hal.59.



seringkali direncanakan, disponsori, dikembangkan, dan dilatih di tempat lain.<sup>26</sup> Oleh karena itu, aktivitas terorisme yang terjadi di satu tempat seringkali dilakukan untuk mendukung serangan di tempat lain. Kelompok-kelompok teroris melakukan kerja sama dalam batas-batas negara dan wilayah. Mereka dapat menggunakan satu negara menjadi tempat latihan, satu negara lainnya sebagai tempat mencari dana, sementara ada juga negara yang seakan menjadi pusatnya.<sup>27</sup>

Oleh karena itu, penanganan terorisme harus dilakukan dengan aksi bersama. Tidak hanya melibatkan satu atau dua negara saja, namun semua negara. Bahkan semua elemen negara mempunyai tanggung jawab yang sama besar dalam memerangi terorisme. Dengan alasan inilah, Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, sebagaimana pada masa pemerintahan Presiden Megawati, melakukan kerja sama multilateral dengan menggandeng forum-forum internasional atau organisasi-organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di dunia dalam upaya memerangi terorisme.

### **III.3.1 ASEAN Security Community (ASC)**

*ASEAN Security Community* adalah sebuah konsep kerja sama militer antar negara-negara ASEAN yang dicetuskan oleh Indonesia dan disepakati oleh para menteri luar negeri negara-negara ASEAN pada *Senior Official Meeting (SOM)*<sup>28</sup> yang dilaksanakan pada tanggal 28-30 Juni 2004 di Jakarta. Konsep ini

<sup>26</sup> Ancaman Terorisme tak Mengenal Batas, *Pikiran Rakyat*, 5 Februari 2004.

<sup>27</sup> Penanganan Terorisme Perlu Aksi Bersama, *Tempo*, 5 February 2004

<sup>28</sup> Pada Pertemuan SOM di JakartaDraf ASC-POA Diterima, *Kompas*, 15 Juni 2004.

merupakan kelanjutan dari hasil Bali Concord II yang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 7-8 Oktober 2003.<sup>29</sup>

Konsep *ASEAN security community* muncul disebabkan kerja sama ekonomi yang telah berlangsung lebih dari tiga dasawarsa itu juga tidak mampu mengantisipasi isu-isu baru seperti terorisme dan kejahatan transnasional lain.<sup>30</sup> *ASEAN security community* merupakan jawaban atas pendekatan itu dalam menghadapi isu-isu keamanan yang tak lagi hanya terkait pada pertahanan dan ancaman militer, tetapi lebih luas, menyangkut hal-hal non-militer, seperti kejahatan transnasional, terorisme, separatisme, perompakan, dan sebagainya. hal ini sesuai dengan pernyataan Drs. Vincensio Dugis, Ph.D. :

“Seiring dengan perkembangan domestik dan dinamika regional serta internasional yang terjadi sejak berakhirnya Perang Dingin, telah bergeser pula makna dari konsep keamanan. Diskursus keamanan tak lagi semata-mata dimaknai sebagai sesuatu yang berkaitan langsung dan hanya dengan masalah pertahanan dan ancaman militer. Tetapi, secara lebih luas, keamanan menyangkut juga soal-soal nonmiliter (sosial-ekonomi) yang juga ikut mengancam kemaslahatan manusia secara lebih luas. Misal problem kesenjangan ekonomi, lalu lintas narkoba, kejahatan kriminal yang terorganisasi secara internasional.

Sejak Deklarasi Bangkok Agustus 1967, ASEAN telah memutuskan untuk mencapai perdamaian melalui mekanisme kerja sama ekonomi. Situasi politik internasional dan regional saat itu mengondisikan para pendiri ASEAN percaya bahwa perdamaian antaranggota ASEAN hanya dimungkinkan melalui jalan kerja sama ekonomi (*achieving peace through economic road*). Sisa- sisa konflik antarbakal calon anggota ASEAN saat itu, menghindari para pendirinya melihat kerja sama politik dan keamanan sebagai salah satu jalan menuju perdamaian. Namun, perkembangan internasional dan regional yang dihadapi ASEAN saat ini jelas berbeda dengan keadaan 36 tahun lalu. Selain keragaman persoalan domestik yang dihadapi masing-masing anggota ASEAN, meluasnya gangguan keamanan yang muncul akibat isu-isu nonmiliter jelas ikut menjadi problem yang membutuhkan perhatian bersama ASEAN. Mekanisme kerja sama ekonomi

<sup>29</sup> Indonesia Usulkan ASEAN Security Community, *Kompas*, 26 Mei 2003.

<sup>30</sup> Selama ini kerja sama ASEAN lebih menitikberatkan pada kerja sama ekonomi dan fungsional yang didasarkan penguatan ekonomi yang mendatangkan kemakmuran di kawasan sehingga tercipta stabilitas dan perdamaian.

tidak lagi cukup menghadapi perubahan yang terjadi. Karena itu, ASEAN semestinya berani memutuskan bahwa ke depan perdamaian dapat dicapai melalui kerja sama keamanan (*achieving peace through security road*).<sup>31</sup>

Penetapan Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community-Plan of Action-ASC-PoA*) pada pertemuan ke-37 para Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) di Jakarta akhir Juni 2004 merupakan hasil pertemuan para Pejabat Senior ASEAN (SOM-ASEAN) di Jakarta pertengahan Juni 2004 dan disahkan pada KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos, November 2004. Untuk itu, sejumlah agenda rencana aksi *ASEAN security community* yang terdiri dari enam komponen utama menyangkut: pembangunan politik (*political development*), pembentukan norma-norma yang dilaksanakan bersama (*shaping and sharing of norms*), pencegahan konflik, resolusi konflik, perdamaian pascakonflik (*post-conflict peace building*), dan mekanisme kelembagaan sesuai aksi pembangunan politik yang adil, demokratis, dan harmonis telah dijabarkan pada masing-masing persoalan dalam *timeline final*, seperti misalnya Piagam ASEAN tahun 2006, ASEAN-PKF (*ASEAN-Peace Keeping Force*) tahun 2012, dan Pembangunan Politik tahun 2017.<sup>32</sup>

Merujuk pada pernyataan Drs. Vinsensio Dugis, PhD. mengenai pentingnya *ASEAN security community* dapat dilihat dari 4 faktor, yaitu :<sup>33</sup>

“Pembentukan *ASEAN security community* tidak mengurangi arti penting dari kerja sama di bidang ekonomi. Sebaliknya, kerja sama keamanan yang meliputi berbagai bidang ini justru menjadi pijakan yang saling memperkuat. Dengan logika pemikiran demikian, sebagian kesangsian mengenai relevansi ASEAN bisa terjawab. Sebagai suatu

<sup>31</sup> Drs. Vinsensio Dugis, PhD, Gagasan Komunitas Keamanan ASEAN, *Kompas.*, 9 Agustus 2003.

<sup>32</sup> Faustinus Andrea, Tantangan Keamanan ASEAN di Masa Datang, *Kompas.*, 7 Agustus 2004.

<sup>33</sup> Drs. Vinsensio Dugis, PhD, *Lock. Cit.*

organisasi regional yang punya sejarah panjang, ASEAN berkesempatan melakukan suatu langkah revitalisasi. Dengan demikian, dilihat dari berbagai segi, ASEAN tetap punya relevansi yang penting.

Bagi Indonesia sebagai penggagas, pembentukan *ASEAN security community* dapat menjadi momentum untuk tidak saja menunjukkan kembali peran penting Jakarta dalam ASEAN, tetapi juga awal untuk menunjukkan bahwa bagaimana pun ASEAN selalu menjadi prioritas pertama politik luar negeri Indonesia. Keberhasilan menempatkan kembali posisi instrumental Jakarta dalam ASEAN tentu menjadi modal tambahan penting terhadap *leverage* politik luar negeri kita terhadap negara di kawasan lain di luar ASEAN.”

Pernyataan yang sama dari Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda semakin menunjukkan betapa pentingnya pembentukan *ASEAN security community*:

“ASC adalah sebuah jalinan kerja sama politik dan keamanan. Langkah itu penting, karena selama 36 tahun, ASEAN lebih memperkokoh pilar kerja sama ekonomi. Hal itu memang tidak terlalu salah. Terutama karena sejak lahir di Bangkok, tahun 1967, Deklarasi Bangkok menekankan kerja sama ekonomi, sosial, dan budaya. Sejak lahir, masalah politik apalagi keamanan tidak pernah disinggung. Namun, seiring dengan perkembangan yang ada, setapak demi setapak ASEAN pun terus memperbaiki diri. Dari seluruh perkembangan itu, pertemuan Bali tahun 1976 bisa dikatakan sebagai land-mark. Pada tahun itu, Bali Concord dengan tegas menyebut perlunya memajukan kerja sama secara seimbang di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya”.<sup>34</sup>

Salah satu alasan dibentuknya *ASEAN security community* adalah masalah terorisme yang terus mengancam yang tentu saja akan berakibat pada insatabilitas kawasan ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia merasa bahwa kerja sama antar negara ASEAN dalam memerangi terorisme mutlak diperlukan. Dalam hasil KTT ASEAN XII yang dilaksanakan di Cebu City, Filipina pada 14 Januari 2007, para pemimpin ASEAN menyepakati kerja sama di bidang terorisme.<sup>35</sup> ASEAN akan diwajibkan untuk saling membantu soal informasi jaringan terorisme dan

<sup>34</sup> Indonesia dan "Rasa Kekitaan" ASEAN, *Kompas*, 29 Agustus 2003.

<sup>35</sup> ASEAN Ikuti Pola Uni Eropa: Ditandatangani Empat Deklarasi dan Satu Konvensi, *Kompas*, 14 Januari 2007.

membantu kemudahan ekstradisi dari satu negara ke negara lain di dalam ASEAN. Kerja sama terorisme ini juga akan memungkinkan negara ASEAN untuk lebih mudah melacak jejak tersangka teroris, melacak jaringan pembiayaan. Para pemimpin, lewat kerja sama di bidang terorisme itu, juga berharap bisa melacak sepak terjang jaringan teroris di dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, akan dilacak, apakah ada sekolah yang dikelola teroris. Juga akan dilacak, bagaimana mereka menebarkan ideologi yang membuat rekrutan mereka bersedia menjadi teroris.

Bahkan, para menteri pertahanan dari negara-negara ASEAN sepakat agar *ASEAN security community* segera diwujudkan. Mereka sepakat sepakat mendukung pembentukan Masyarakat Bersama ASEAN terutama di bidang keamanan atau *ASEAN Security Community (ASC)* pada 2015, dipercepat lima tahun dari yang diagendakan sebelumnya 2020.<sup>36</sup> Mengenai masalah penanganan terorisme diwajibkan untuk saling membantu soal informasi jaringan terorisme dan membantu kemudahan ekstradisi dari satu negara ke negara lain di dalam ASEAN. Kerja sama penanganan terorisme ini juga akan memungkinkan negara ASEAN untuk lebih mudah melacak jejak tersangka teroris, melacak jaringan pembiayaan.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Menhan Se-Asean Ingin ASC Terbentuk 2015, dalam

Maret 2007.

<sup>37</sup> Menhan Se-ASEAN Dukung Percepatan Dibentuknya ASC Pada 2015, dalam

, diakses tanggal 10 Januari 2007.

, diakses tanggal 27

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Terorisme adalah perlawanan atau peperangan bukan pada serdadu (militer) melainkan pada orang-orang tidak berdosa dan masyarakat sipil. Mereka adalah pembunuh-pembunuh pengecut yang mengambil sikap dengan membunuh orang-orang tidak bersalah, dengan target untuk menciptakan ketakutan. Tujuan mereka adalah mengintimidasi atau menekan pemerintah, masyarakat sipil, atau bagian-bagiannya, untuk memaksa tujuan sosial dan politik.

Telah banyak negara di dunia yang telah menjadi sasaran tindakan terorisme. Salah satunya Indonesia. Terhitung telah terjadi sedikitnya 3 aksi terorisme dengan menggunakan aksi peledakan bom sejak tahun 2002 yang telah menewaskan sedikitnya 199 orang. Sebuah aksi yang tentu saja memberikan efek negatif yang luar biasa bagi Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial maupun politik.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia pada kurun waktu 2002 hingga 2007 melakukan berbagai upaya diplomasi memerangi terorisme (*counter terrorism*). Indonesia pada kurun waktu itu melakukan banyak kerja sama, baik bilateral maupun multilateral, dalam memerangi terorisme (*counter terrorism*). Kerja sama ini perlu dilakukan karena terorisme pada saat ini sudah tidak mengenal batas wilayah dan bukan lagi merupakan ancaman bagi kehidupan di suatu negara, melainkan sudah menjadi ancaman regional, bahkan menjadi

ancaman global. Sehingga diperlukan kerja sama antar negara untuk memeranginya.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, Indonesia melaksanakan langkah-langkah diplomasi dalam memerangi terorisme (*counter terrorism*) dengan melakukan kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat, Australia dan Kanada, serta menggunakan ASEAN sebagai sarana menjalin kerja sama multilateral dalam memerangi terorisme (*counter terrorism*).

Indonesia berusaha melakukan upaya diplomasi untuk mencabut embargo militer yang diberikan oleh Amerika Serikat. Hasilnya adalah Amerika Serikat setuju untuk menghapuskan embargo militer pada pasal pembelian perlengkapan militer non-lethal. Selain itu, Amerika Serikat juga memberikan bantuan keuangan melalui program *International Military Education and Training* (IMET) bagi Indonesia untuk memerangi terorisme. Pada tahun 2002, Amerika Serikat memberikan bantuan sebesar 50 juta dollar AS yang dialokasikan untuk peningkatan kemampuan polisi sebesar 47 juta dollar AS dan sisanya untuk pelatihan militer. Pada tahun fiskal 2001-2004 AS kembali mengucurkan dana sebesar 31 juta dollar AS yang diperuntukkan bagi pelatihan dan bantuan untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). AS juga memberikan beasiswa kontraterorisme regional yang memberikan pelatihan kontraterorisme dan hal-hal terkait dengan militer AS senilai 4 juta dollar AS pada tahun fiskal 2002-2003.

Kerja sama dengan Australia melahirkan dua badan anti-teror, yaitu *Trans-national Crime Centre* (TNCC) dan *Jakarta Centre of Law Enforcement Cooperation* (JCLEC). TNCC adalah sebuah lembaga yang didirikan dengan

tujuan bukan hanya berusaha untuk memerangi teror, namun juga mengantisipasi sebelum aksi teror tersebut terjadi. Untuk program ini, Indonesia mendapatkan dana sebesar A\$ 10 juta (Rp. 65 milyar) untuk memberantas terorisme untuk jangka waktu empat tahun.

Sedangkan *Jakarta Centre of Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) adalah lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk menciptakan penyidik-penyidik yang berkualitas multiyurisdiksional dalam investigasi kejahatan transnasional. Untuk program ini, Pemerintah Australia memberikan sumbangan AUD 38,3 juta selama 5 tahun. Termasuk di dalamnya tenaga ahli, dukungan teknis, dan kursus latihan internasional.

Kanada adalah mitra ketiga Indonesia dalam memerangi terorisme di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Dalam diplomasinya, Indonesia berhasil menjalin kerja sama dengan Kanada di bidang *Counter-Terrorism on Nuclear, Biological and Chemical Weapons* (CT-NBC) dalam bentuk program *Training for Trainers* melalui pengiriman tenaga pelatih untuk melatih aparat Indonesia. Pihak Kanada mengharapkan kerjasama ini dapat ditujukan untuk membantu program JCLEC (*Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation*).

Diplomasi pun dilakukan untuk mengupayakan kerja sama multilateral dalam memerangi terorisme (*counter terrorism*). Indonesia menggunakan ASEAN sebagai sarana. Dalam upaya diplomasinya, Indonesia berupaya mewujudkan idenya mengenai *ASEAN security community* (ASC). *ASEAN security community* (ASC) merupakan sebuah konsep kerjasama militer antara negara-negara ASEAN yang bertujuan menciptakan stabilitas keamanan di kawasan ASEAN.



Dengan konsep *ASEAN security community* (ASC) ini diharapkan kerja sama antar negara ASEAN dalam memerangi terorisme dapat lebih efektif melalui pertukaran informasi intelijen yang diharapkan dapat memutus jalur pembelian senjata maupun memutus dan membongkar jaringan terorisme di kawasan ASEAN.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2007), Indonesia tetap melakukan upaya diplomasi dalam upaya memerangi terorisme. Dalam konteks bilateral, Indonesia tetap menggandeng Amerika Serikat dan Australia.

Indonesia melakukan diplomasi yang berupaya memulihkan normalisasi hubungan militer dengan Amerika Serikat. Hal ini dirasa perlu sebab Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono masih berada dalam keadaan embargo militer oleh Amerika Serikat. Embargo tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap lemahnya teknologi dan kurangnya perlengkapan senjata yang dimiliki TNI untuk memerangi terorisme.

Upaya diplomasi untuk normalisasi hubungan ini menuai hasil positif. Hal ini bisa dilihat pada bulan November, Amerika Serikat telah mencabut embargo militernya pada pasal mengenai penjualan persenjataan *non-lethal* seperti kendaraan untuk transportasi dan perlengkapan komunikasi.

Tidak hanya itu, Amerika Serikat melalui program *International Military Education and Training* (IMET), menaikkan bantuannya yang semula hanya sebesar US\$ 400,000 menjadi US\$ 600,000. Amerika Serikat juga menaikkan pemberian pinjaman militer asing (*Foreign Military Financing/FMF*) ke

Indonesia, dari sebelumnya 1 juta dollar AS menjadi 15,7 juta dollar AS. Selain itu, rancangan anggaran *State Department* Pemerintah AS tahun 2008 juga mengusulkan kenaikan alokasi anggaran untuk program IMET bagi Indonesia, dari 938.000 dollar AS menjadi 974.000 dollar AS.

Sedangkan kerjasama bilateral dengan Australia dalam *counter terrorism* telah mengalami perkembangan. Setelah sukses memprakarsai berdirinya *Transnational Crime Centre (TNCC)* dan *Jakarta Centre of Law Enforcement Cooperation (JCLEC)*, Pemerintah Australia memberikan bantuan keuangan untuk intelijen dan pengawasan di daerah perbatasan melalui program *Australia Development Program*. Pada tahun 2004, Indonesia mendapatkan bantuan sebesar 160,8 juta dolar Australia.

Bahkan dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak 8 Desember 2004 Australia berencana menaikkan bantuannya sebesar 2 kali lipat, yaitu dari 10 juta dollar Australia menjadi 20 juta dollar Australia untuk program *counter terrorism*. Indonesia juga mendapatkan bantuan sebesar 36,8 juta dollar Australia untuk biaya operasional *counter-terrorism*, baik di tingkat bilateral maupun regional melalui program *Jakarta Centre of Law Enforcement Cooperation (JCLEC)*. Dan alokasi dana bagi program *Transnational Crime Center (TNCC)* mencapai 4,7 juta dollar Australia yang digunakan oleh Polri untuk mencegah dan mengidentifikasi segala bentuk kejahatan transnasional, termasuk terorisme.

Dalam konteks multilateral, Susilo Bambang Yudhoyono tetap menggunakan ASEAN sebagai sarana melaksanakan upaya diplomasi memerangi terorisme (*counter terrorism*). Konsep *ASEAN security community (ASC)* yang

mulai diperjuangkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati tetap diperjuangkan.

Hasil yang didapat dari upaya diplomasi Indonesia tersebut mendapat sambutan positif. Hal ini bisa dilihat dari keinginan para menteri pertahanan dan menteri luar negeri negara-negara ASEAN menyetujui gagasan terbentuknya ASC. Bahkan mereka meminta agar ASC segera terbentuk pada tahun 2015, lebih cepat 5 tahun dari rencana semula yang rencananya ASC akan dibentuk pada 2020.

Selain itu, Indonesia juga mampu menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN mengenai *counter terrorism*. Dalam KTT ASEAN XII di Filipina, ASEAN mewajibkan untuk saling membantu soal informasi jaringan terorisme dan membantu kemudahan ekstradisi dari satu negara ke negara lain di dalam ASEAN. Kerja sama penanganan terorisme ini juga akan memungkinkan negara ASEAN untuk lebih mudah melacak jejak tersangka teroris, melacak jaringan pembiayaan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan diplomasi counter terrorism secara persuasif, yaitu melakukan kerja sama dengan banyak negara dan organisasi multilateral, ASEAN. Upaya diplomasi persuasif ini semakin jelas terlihat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 5-6 Maret 2007 di Jakarta, Indonesia bekerja sama dengan Australia menyelenggarakan Konferensi Sub Regional Tingkat Menteri Luar Negeri mengenai counter terrorism yang salah satu pokok

bahasannya adalah upaya kerja sama de-radikalisasi terorisme dengan sejumlah negara Islam untuk mengurangi ancaman terorisme.

Namun hal itu tidak berarti Indonesia tidak bersifat agresif. Disahkannya UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri merupakan wujud nyata dari agresifitas Indonesia dalam memerangi terorisme (*counter terrorism*). Agresifitas tersebut juga terlihat dengan tertangkapnya otak-otak dibalik serangan terorisme yang selama ini terjadi. Keberhasilan ini mendapat pengakuan dari Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pun Indonesia tetap agresif. Terbukti dengan upaya diplomasi Indonesia terkait pencabutan embargo militer oleh Amerika Serikat yang pada akhirnya diharapkan dengan pencabutan embargo militer tersebut akan mampu meningkatkan kemampuan militer Indonesia, baik dalam persenjataan maupun teknologi sehingga ancaman terorisme bisa ditangkal lebih awal.

| MASA PEMERINTAHAN        | NEGARA/ORGANISASI YANG BEKERJA SAMA      | SIFAT KERJA SAMA             | HASIL KERJA SAMA  |
|--------------------------|--|------------------------------|---|
| Megawati Soekarno Putri. | 1. Amerika Serikat.<br><br>2. Australia. | Bilateral.<br><br>Bilateral. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>International Military Education and Training (IMET)</i> senilai US\$ 50 juta (2002).</li> <li>• <i>Regional Counter Terrorism Fellowship Program</i> senilai US\$ 4 juta (2002).</li> <li>• <i>Theater Security Cooperation Program</i> (2002).</li> <li>• Bantuan sebesar US\$ 16 juta untuk pelatihan Polri (April 2002).</li> <li>• Beasiswa kontra terrorism sebesar US\$ 4 juta (2002-2003).</li> <li>• <i>Trans-national Crime Centre (TNCC)</i> senilai AUD 10 juta dan <i>Jakarta Centre of Law Enforcement Cooperation (JCLEC)</i> senilai AUD 38,3 juta, diresmikan pada 3 Juli</li> </ul> |

|  |            |               |  |
|--|------------|---------------|--|
|  |            |               | 2004.  |
|  |            |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengusutan pemboman Kedutaan Australia di Jakarta senilai AUD 5 juta.</li> <li>• Pengiriman tenaga ahli dalam <i>International Management of Serious Crime</i> (IMOSC).</li> </ul>  |
|  | 3. Kanada. | Bilateral.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengiriman tenaga ahli dalam program <i>Training for Trainers</i>.</li> <li>• Kerja sama di bidang <i>Counter Terrorism on Nuclear, Biological and Chemical Weapons</i> (CT-NBC).</li> <li>• Perluasan dialog dan pertukaran pelajar dalam studi Islam dan pluralisme serta peningkatan dialog anatar agama.</li> </ul> |
|  | 4. ASEAN   | Multilateral. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan <i>ASEAN security community</i>.</li> </ul>   |

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Buzan, Barry dan Gowher Rivzi, *South Asian Insecurity and The Great Powers* (London: The Macmillan Press LTD., 1986).
- Dougherty, James E. Dan Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations, A Comprehensive Survey, 4th Edition* (New York: Longman Inc., 1997).
- Holsti, K.J., *Politik Internasional: Kerangka Analisa, terj. Elfin Sudrajat* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1987).
- Hurrell, Andrew, "Regionalism in Theoretical Perspective", dalam Andrew Hurrell dan Louise Fawcett (eds.), *Regionalism in World Politics* (London: Oxford University Press, 1995).
- Lovell, John P., *Foreign Policy in Perspective* (New York: HR and Winston, 1970).
- Mas'ood, Mochtar, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi* (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM, 1989).
- Nasir, Moh., *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Plano, Jack C., dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional, terj. Edi S. Siregar* (Bandung: CV. Abardin, 1990).
- Robinson, Thomas W., "National Interest", dalam James N. Rosenau (eds.), *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory* (New York: The Free Press, 1969).
- Roy, S.L., *Diplomasi, terj. Harwanto dan Mirsati* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).
- S, Adjie, *Terorisme* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005).
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989).
- Tjokroaminoto, Prof. Bintoro, *Teori Pembangunan Nasional* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1084).

Wahid, Abdul, *et. al.*, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004).

Young, Oran, *International Cooperation: Building Regimes for Natural Resources and The Environment* (New York: Cornel Up, 1989).

### Artikel

“Ali Imron Ungkap Kronologi Peledakan Bom Bali”, *Kompas*, 5 Juni 2003.

“AS Minta Pemahaman RI Soal Terorisme”, *Kompas*, 11 Maret 2004.

“Amerika Pahami Kejengkelan Indonesia Soal Travel Warning”, *Kompas*, 21 Desember 2004.

“Akuntabilitas HAM Tetap Ditagih”, *Kompas*, 24 November 2005.

“AS Berniat Jalin Kerja Sama Militer Dengan Indonesia”, *Kompas*, 3 Agustus 2002.

“Ancaman Terorisme Tak Mengenal Batas”, *Pikiran Rakyat*, 5 Februari 2004.

“Australia Tambahkan Rp 32,5 Miliar Untuk Penyelidikan Bom Kuningan”, *Tempo*, 11 September 2004.

“AS Ingin Mulai Kerja Sama Militer dengan RI”, *Kompas*, 7 Mei 2005.

Atqa, Muhammad, Australia Terapkan Travel Warning Bagi Indonesia, *Kompas*, 4 Oktober 2005.

Andrea, Faustinus, *Tantangan Keamanan ASEAN di Masa Datang*, *Kompas*, 7 Agustus 2004.

“ASEAN Ikuti Pola Uni Eropa: Ditandatangani Empat Deklarasi dan Satu Konvensi”, *Kompas*, 14 Januari.

Dugis, Vinsensio, *Gagasan Komunitas Keamanan ASEAN*, *Kompas*, 9 Agustus 2003.

“Hadirnya Rice Cerminkan Apresiasi AS”, *Kompas*, 14 Maret 2006.

“Indonesia Usulkan ASEAN Security Community”, *Kompas*, 26 Mei 2003.



- “Indonesia Akan Selenggarakan Konferensi Kontra-Terrorisme”, *Gatra*, 25 Februari 2007.
- “Indonesia dan Rasa Kekitaan ASEAN”, *Kompas*, 29 Agustus 2003.
- “JCLEC dan Tuntutan Profesionalisme Polisi”, *Kompas*, 1 Juli 2004.
- “Kerja Sama Militer AS dan Indonesia Makin Membaik”, *Kompas*, 19 April 2007.
- “Latihan Kopaska TNI AL-US Navy Seal Bukti IMET Telah Dibuka Kembali”, *Kompas*, 14 Mei 2005.
- Loeis, Wisber, *Mewujudkan ASEAN Security Community*, Pikiran Rakyat, 15 September 2003.
- “Menengok Sekolah Antiteror”, *Suara Merdeka*, 4 Juli 2003.
- “Pada Pertemuan SOM di Jakarta Draff ASC-POA Diterima”, *Kompas*, 15 Juni 2004.
- “Pertemuan Menlu ASEAN Sepakat Rekomendasikan Bali Concord II”, *Kompas*, 5 Oktober 2003.
- “Penanganan Terrorisme Perlu Aksi Bersama”, *Tempo*, 5 Februari 2004.
- Perl, Raphael, *Terrorism, The Future, and U.S. Foreign Policy*, Congressional Research Service, 11 April 2003.
- “RI Akan Usulkan Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN”, *Pikiran Rakyat*, 27 Agustus 2003.
- Resuming U.S.-Indonesia Military Ties, *Asia Briefing Paper*, 21 Mei 2002.
- “SOM ASEAN Sepakati Konsep ASC”, *Kompas* 13 September 2003.
- Schoenberger, Karl, *Indonesian Military Using Terror Fears to Regain Power*, Knight Ridder Tribune News Service, 21 Maret 2003.
- “Teror Bom dan Wisatawan AS”, *Kompas*, 19 November 2005.
- “US, Indonesia Navies Hold Jooint Anti-Terror Exercise”, *Oster Dow Jones*, 10 Mei 2005.
- US-Indonesia Relations: Searching for Cooperation in The War Against Terrorism* (Asia Pacific Center for Security Studies, 2 Mei 2003).

*United States-Indonesia Military Relations*, Congressional Record, 11 Februari 2005.

Vermonte, Philips Jusario, *ASEAN Harus Tetap "Corner Stone"*, Kompas, 1 April 2004.

"Wisatawan Asing ke Bali Tinggal 700 Orang per Hari", *Kompas*, 2 November 2002.

"Yudhoyono Memulai Kunjungan di AS", *Pikiran Rakyat*, 26 Mei 2005.

### Jurnal

Emerson, Donald, "Voting and Violence: Indonesia and East Timor in 1999", dalam *Indonesia Beyond Soeharto: Polity, Society, Transition* (Armonk: M.E. Sharp, 1999).

May, Jr., Charles A., "Introduction to Strategy", dalam Ricard G. Head and Ervin J. Rokke (eds.), *American Defense Policy, 3rd ed.* (Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1973).

Yimin, Song, *The Security Strategy and Foreign Relations Have Entered a New Stage of Readjusment* (Journal of International Studies, 2002).

### Artikel yang Diakses Melalui Internet

"Australia Raises Counter-Terrorism Assistance To Indonesia", dalam *...*, diakses tanggal 24 Januari 2007.

"Buku Putih Dephan: Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21", dalam <http://www.dephan.go.id>, diakses tanggal 27 Maret 2007.

"Buletin Balitbang Dephan", dalam [www.balitbang.dephan.go.id/counter\\_terrorism/htm](http://www.balitbang.dephan.go.id/counter_terrorism/htm), diakses tanggal 27 Maret 2007.

"Berharap Embargo Senjata Dihapus?", dalam *...*, diakses tanggal 27 Maret 2007.

Brummit, Chris, "US Lifts Embargo on Indonesia Arms Sales", dalam *...*, diakses tanggal 3 Januari 2007.

- Curtin, Leslie B., "Toward a New Foreign Policy in Indonesia, The Islamic Giant in Southeast Asia, Fundamental of Strategic Logic", dalam [www.asean.org](#), diakses tanggal 3 Januari 2007.
- "Hubungan Bilateral RI-Kanada", dalam [www.jakarta-centre-for-law-enforcement-coop/Hubungan-Bilateral-RI-Kanada.htm](http://www.jakarta-centre-for-law-enforcement-coop/Hubungan-Bilateral-RI-Kanada.htm), diakses tanggal 24 Januari 2007.
- "Indonesia Gets U.S. Aid Against Terrorism", dalam [www.usaid.gov](#), diakses tanggal 3 Januari 2007.
- "Indonesia Upayakan Perluasan Trans National Crime Centre", dalam [www.asean.org](#), diakses tanggal 10 Januari 2007.
- "Kerja Sama Antiteror RI-Australia Bangun TNCC", dalam [www.asean.org](#), diakses tanggal 10 Januari 2007.
- "Kita Berhutang pada Masyarakat untuk Memerangi Terorisme", dalam [www.asean.org](#), diakses tanggal 24 Januari 2007.
- "Menhan Se-Asean Ingin ASC Terbentuk 2015", dalam [www.asean.org](#), diakses tanggal 27 Maret 2007.
- "Menhan Se-ASEAN Dukung Percepatan Dibentuknya ASC Pada 2015", dalam [www.asean.org](#), diakses tanggal 10 Januari 2007.
- "Pemerintah Tetapkan Tiga Program untuk Pulihkan Pariwisata Bali", dalam [www.asean.org](#), diakses tanggal 13 Februari 2007.
- "Pernyataan Bersama antara Amerika Serikat dengan Indonesia", dalam [www.usaid.gov](#), diakses tanggal 24 Desember 2006.
- "Presiden Resmikan Jakarta Centre of Law Enforcement Cooperation", dalam [www.asean.org](#), diakses tanggal 10 Januari 2007.
- "Pentingnya Memelihara Hubungan Bilateral Indonesia dan Australia", dalam [www.asean.org](#), diakses tanggal 24 Januari 2007.
- "RI dan Australia Siapkan Pusat Anti Teror", dalam [www.asean.org/news&article](#), diakses tanggal 27 Maret 2007.
- "Sejarah Hubungan Diplomatik", dalam [www.asean.org](#), diakses tanggal 24 Januari 2007.

“Travel Warning Pasca Bom Bali II Terus Berlanjut”, dalam  
, diakses tanggal 13 Februari 2007.

“U.S. Department of Defense Military Dictionary”, dalam  
, diakses tanggal 24 Desember 2006.

### **Artikel yang Tidak Dipublikasikan**

Cotan, Imron, *Peluang dan Tantangan Hubungan Bilateral Indonesia-Australia*  
(Ceramah Duta Besar LB dan BP RI, Desember 2004).

